



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PENERAPAN TIGA KOMPONEN PENGANGGARAN  
PADA PENYUSUNAN RKA-KLBATAN TAHUN 2008**

**TESIS**

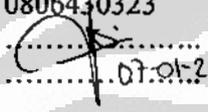
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

**NATA WIJAYA  
0806430323**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH  
JAKARTA  
JANUARI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nata Wijaya  
NPM : 0806430323  
Tanda tangan :   
Tanggal : .....07.01.2010

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Nata Wijaya  
NPM : 0806430323  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Analisis Penerapan Tiga Komponen Penganggaran  
Pada Penyusunan RKA-K/L Batan Tahun 2008

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Drs. Desi Fernanda, M.Soc,Sc. (.....)  
Penguji : Iman Rozani S.E., M.Sc. (.....)  
Penguji : Niniek L. Gyat S.E., M.Soc.Sc. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Januari 2010

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil 'alamin, terima kasih ya Allah atas izin dan kuasa-Mu jua, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi Program Studi Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sepenuhnya saya sadari, tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, tidaklah saya mampu menyelesaikan ini semua. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Desi Fernanda, pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyelesaian tesis ini;
2. Istriku tercinta, Fitri Haryanti Rahayu. Anak-anakku tersayang: Nadia, Harits, Hamam, dan Nayla, terima kasih untuk doa dan motivasinya ;
3. Mama, Bapak, Tika dan Nana, terima kasih atas doa-doanya buat saya;
4. Bapak Is dan Ibu, Bambang dan Sugeng, terima kasih untuk dukungannya;
5. Pihak MPKP UI: Para dosen dan karyawannya, untuk Pak Andi Fahmi, Pak Iman, Mba Siti, Mba Ira dan Mba Keke, terima kasih untuk segalanya;
6. Teman-teman MPKP UI angkatan XIX Bappenas: Andri, Rony, Anton, Sidik, Sofyan, Legianto, Elyis, Junenti, Irawan, Firman, Irma, Ivon, Diah, Dian, Nova, Ila, Desi, Dea, Ruby, terima kasih untuk kebersamaannya;
7. Sejawat kerja: Pak Falconi, Pak Agus, Pak Irwan, Pak Arif, Pak Muntako, Paido, Wachid, Yogi, Dian, Dhani, Handy, Yusri dkk, terima kasih untuk dukungannya;
8. Mas Eko, Mba Yani, ikhwan dan akhwat Cilandak Timur, rekan usar, para ustadz, semua pihak yang telah membantu saya menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan berlipat ganda. Semoga tesis ini memberi manfaat dan kebaikan bagi yang membacanya.

Jakarta, 7 Januari 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nata Wijaya  
NPM : 0806430323  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Departemen : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Penerapan Tiga komponen Penganggaran Pada Penyusunan RKA-K/L Batas Tahun 2008

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Januari 2010

Yang Menyatakan,



(Nata Wijaya)

## ABSTRAK

Nama : Nata Wijaya  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul : Analisis Penerapan Tiga komponen Penganggaran Pada  
Penyusunan RKA-K/L Batan Tahun 2008

Tesis ini membahas penerapan tiga komponen penganggaran pada penyusunan RKA-K/L Batan untuk tahun anggaran 2008. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penerapan komponen penganggaran terpadu telah tercapai, sementara komponen penganggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah terkendala pada data perkiraan maju. Sedangkan penerapan komponen penganggaran berbasis kinerja telah sampai pada tahap kesesuaian antara input dan output kegiatan dengan sasaran program dan renstra Batan. Pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai perencanaan program dan kegiatan serta penyusunan anggaran, amat dibutuhkan untuk dapat menerapkan tiga komponen penganggaran pada penyusunan RKA-K/L.

**Kata kunci:**

Anggaran, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Kinerja

## ABSTRACT

Name : Nata Wijaya  
Study Program : Master of Planning and Public Policy  
Title : Analysis of Implementation of three components of budgeting  
in the formulation of Batan's RKA-K/L in 2008

This thesis discusses the implementation of three budgeting components in the formulation of Batan's RKA-K/L for fiscal year 2008. This research is qualitative research with a descriptive design. The results showed that the objectives of unified budgeting component has been reached, while the components of budgeting in the medium-term expenditure framework is constrained at forward estimated data. Meanwhile the implementation of performance-based budgeting component has reached the level of conformity between input and output activities with program goals and Batan's strategic plan. Good knowledge and comprehension of planning programs and budget formulation is required to be able to implementing the three budgeting components in the formulation of RKA-K/L.

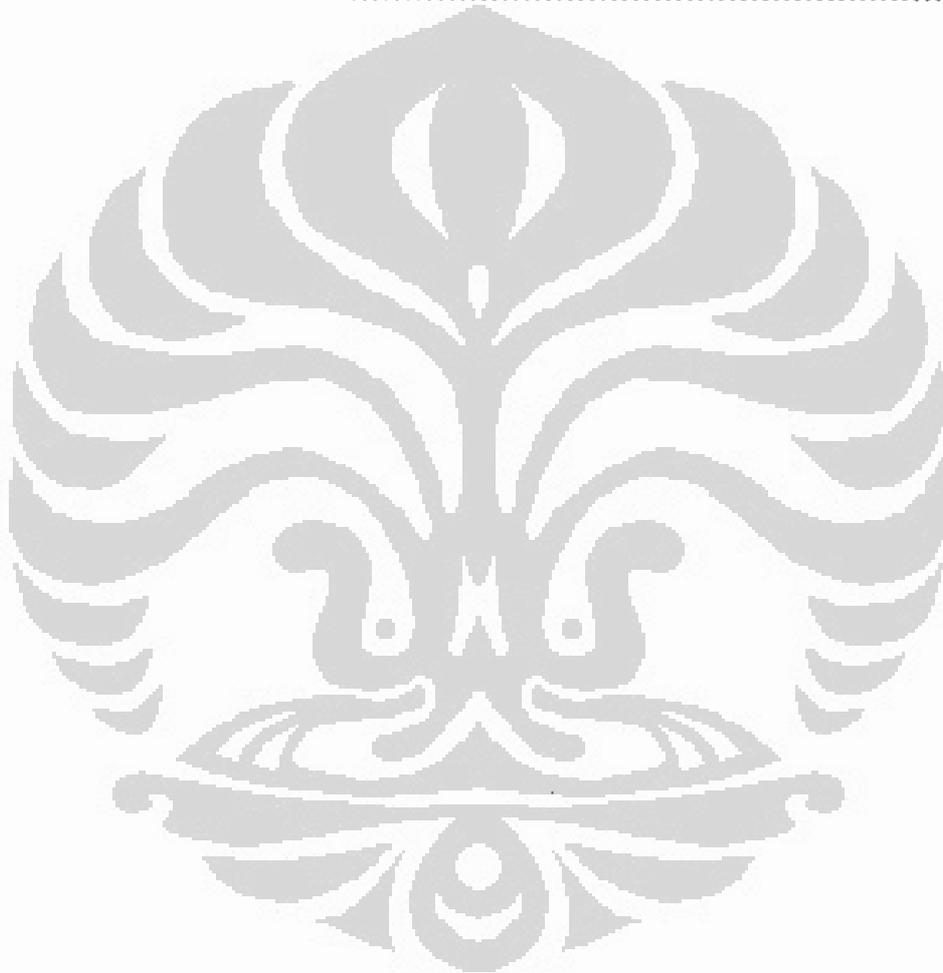
**Keywords:**

Budget, Medium Term Expenditure Framework, Performance

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Rumusan Permasalahan .....	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tesis .....	6
1.5. Ruang Lingkup .....	7
1.6. Kerangka Berpikir .....	7
1.7. Metodologi Penelitian .....	8
1.9. Sistematika Penulisan .....	9
<b>2. TEORI DAN TINJAUAN LITERATUR RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA-K/L) .....</b>	<b>11</b>
2.1 RKA-K/L dan Perencanaan Penganggaran Negara .....	11
2.2. Kaidah Penyusunan RKA-K/L .....	13
2.3. Pendekatan Sistem Penganggaran .....	14
2.3.1. Komponen Pendekatan Penganggaran Terpadu .....	14
2.3.2. Komponen Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah .....	19
2.3.3. Komponen Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja .....	21
<b>3. GAMBARAN UMUM PENYUSUNAN RKA-K/L BATAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Kebijakan Strategik Batan .....	24
3.1.1. Wewenang, Visi, dan Misi Batan .....	25
3.1.2. Fokus Program (Landmark) Batan .....	26
3.2. Perencanaan Penganggaran Batan .....	29
3.2.1. Klasifikasi Anggaran Batan .....	30
3.2.2. Instrumen Pengalokasian Anggaran .....	34
3.3. Input data RKA-K/L Batan Tahun 2008 .....	35
<b>4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENERAPAN TIGA KOMPONEN PADA PENYUSUNAN RKA-K/L.....</b>	<b>37</b>
4.1. Analisis Satuan Kerja Batan .....	37
4.2. Analisis Program Batan .....	40
4.3. Analisis Kegiatan Batan .....	42
4.3.1. Keterpaduan Antara Kegiatan dengan Program Batan .....	44

4.3.2. Analisis Satuan Keluaran Kegiatan .....	50
4.3.3. Analisis Volume Keluaran Kegiatan .....	52
4.3.4. Analisis Kinerja Pada Kegiatan .....	57
4.4. Analisis Jenis Belanja .....	60
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2. Saran .....	65
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik Anggaran Batan 2005 – 2008 .....	2
Gambar 1.2. Kerangka Berpikir Analisis Penerapan Tiga Komponen Penganggaran .....	8
Gambar 2.1. Skema Penyusunan APBN .....	12
Gambar 2.2. Kerangka Ideal Penganggaran Terpadu .....	18
Gambar 2.3. Diagram Sistem Perencanaan dan Penganggaran .....	21
Gambar 2.4. Diagram Alur Informasi Dalam Dokumen Rencana Anggaran .....	23
Gambar 3.1. Struktur Organisasi Batan .....	24
Gambar 3.2. Struktur Penganggaran Batan berdasarkan Klasifikasi Organisasi .....	31
Gambar 3.3. Struktur Penganggaran Batan berdasarkan Klasifikasi Fungsi .....	33
Gambar 3.4. Struktur Penganggaran Batan berdasarkan Klasifikasi Ekonomi .....	34
Gambar 4.1. Komposisi anggaran Batan berdasarkan jenis kegiatan .....	43
Gambar 4.2. Komposisi jenis belanja per jenis kegiatan Batan .....	61

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Konversi Belanja Negara menurut Jenis Belanja .....	4
Tabel 1.2. Penerapan Pengeluaran Jangka Menengah dalam dokumen RKA-K/L 2006 .....	5
Tabel 3.1. Fokus Program dan Indikator keberhasilan Batan .....	26
Tabel 3.2. Program dan Kegiatan Batan .....	28
Tabel 3.3. Komponen RKA-K/L dan rincian input-nya.....	35
Tabel 3.4. Jenis-jenis Form hasil cetak dokumen RKA-K/L tahun 2008 .....	36
Tabel 4.1. Data Komponen RKA-K/L Batan tahun 2008 .....	37
Tabel 4.2 Jumlah Pagu, PNS dan Penanggungjawab Pengelola Keuangan Batan tahun 2008 .....	38
Tabel 4.3. Kesesuaian Program RKA-K/L tahun 2008 dengan misi Batan .....	40
Tabel 4.4. Nama dan satuan keluaran dari kegiatan dalam RKA-K/L Batan tahun 2008 yang digunakan oleh beberapa Satuan Kerja .....	51
Tabel 4.5. Komposisi data KPJM menurut jenis kegiatan .....	52
Tabel 4.6. Komposisi data menurut satuan keluaran .....	54
Tabel 4.7. Komposisi Data menurut satuan keluaran per jenis kegiatan .....	56
Tabel 4.8. Uraian Input, Output dan Outcome dari Kegiatan Batan tahun 2008 .....	58
Tabel 4.9. Bagan Akun Standar pada kegiatan Batan .....	62

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.a	Contoh hasil cetak Form 1.1 RKA-K/L Batan tahun 2008 .....	68
Lampiran 1.b.	Contoh hasil cetak Form 1.2 RKA-K/L Batan tahun 2008 .....	69
Lampiran 1.c.	Contoh hasil cetak Form 1.3 RKA-K/L Batan tahun 2008 .....	70
Lampiran 1.d	Contoh hasil cetak Form 1.4 RKA-K/L Batan tahun 2008 .....	71
Lampiran 1.e.	Contoh hasil cetak Form 1.5 RKA-K/L Batan tahun 2008 .....	72
Lampiran 2.	Jenis Belanja Per Kegiatan Batan Tahun 2008 .....	73
Lampiran 3.	Kegiatan Batan dan keluarannya dalam Sasaran Program Batan tahun 2008 .....	75
Lampiran 4.	Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Batan per Kegiatan .....	78

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batn) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1958, Batn telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia. Di bidang pangan dan pertanian, Batn telah menghasilkan berbagai varietas baru tanaman pangan yang unggul. Di bidang kesehatan, Batn memberikan dukungan dalam bentuk peralatan kedokteran nuklir dan sediaan radiofarmaka untuk rumah sakit. Di bidang industri dan manufaktur, melalui penggunaan radioisotop dan radiasi, Batn berperan dalam pengendalian mutu, inspeksi produk, dan peningkatan teknologi proses.

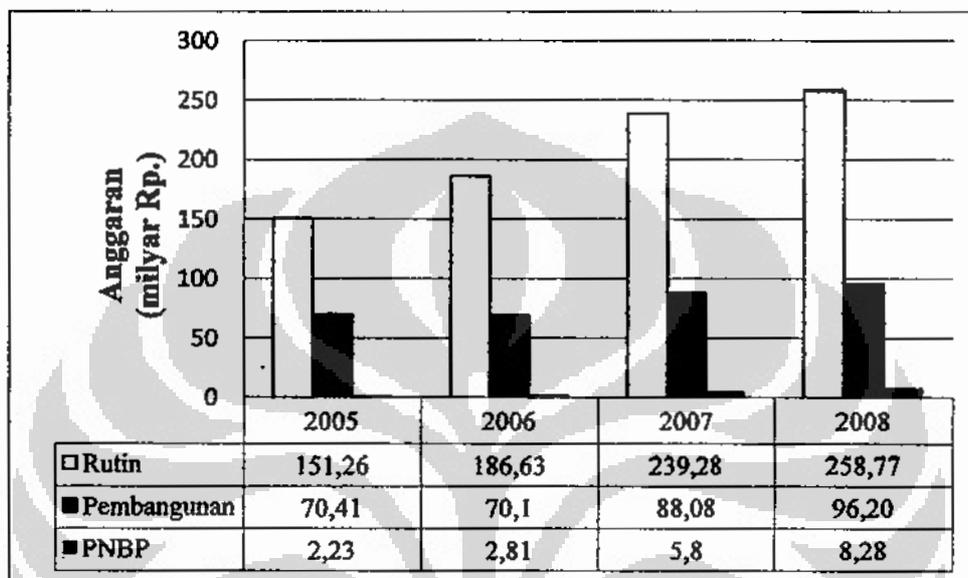
Peran Batn menjadi lebih strategis, bila dikaitkan dengan pemanfaatan iptek nuklir di bidang energi. Melalui konsep Kebijakan Energi Nasional, Indonesia telah memasukkan nuklir sebagai salah satu opsi energi nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik dalam 1 dan 2 dasawarsa ke depan. Meskipun konsep energi mix untuk tahun 2025 ini masih didominasi oleh bahan bakar fosil (batubara 32,7% dan minyak bumi 26,2%) namun energi nuklir telah masuk pada komposisi terdistribusi 1,993% terhadap kebutuhan energi nasional<sup>1</sup>. Ini merupakan langkah besar dalam pengembangan iptek nuklir. Meskipun aplikasi nuklir dalam bidang lainnya (pangan, kesehatan dan industri) sudah lama berkontribusi, namun dalam hal memenuhi kebutuhan listrik nasional baru dapat diadopsi dengan tahapan pembangunan tersebut.

Untuk dapat melaksanakan peluang dan tantangan tersebut, Batn harus mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya di tengah kelemahan yang ada. Salah satu kendala yang dihadapi Batn adalah ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasa (litbangyasa), dan diseminasi serta pengadaan dan pemeliharaan fasilitas nuklir dan sarana penunjangnya agar tetap beroperasi dengan baik, tepat waktu, tepat

---

<sup>1</sup> Blue print pengelolaan energi nasional 2005 – 2025, Departemen ESDM ([www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id))

sasaran, tepat guna, dan berhasil guna saat diperlukan. Permasalahannya klasik, yaitu selama ini anggaran yang tersedia sangat terbatas, baik untuk kegiatan litbangyasa, diseminasi, maupun penanganan sisem jaminan mutu termasuk fungsionalisasi perangkat nuklir.



Gambar 1.1. Grafik Anggaran Batan 2005 – 2008

Sumber: RKA-KL Batan 2005 - 2008; telah diolah kembali

Upaya mengoptimalkan perencanaan program/kegiatan dan penyusunan anggaran diperlukan untuk dapat mendayagunakan anggaran yang terbatas, sehingga dengan anggaran yang ada, Batan tetap mampu melakukan litbangyasa iptek nuklir bidang energi dan non energi. Perencanaan program dan penyusunan anggaran ini berada dalam satu proses yaitu penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Batan.

Sejak tahun anggaran 2008, Batan mulai menerapkan tiga komponen penganggaran dalam penyusunan RKA-K/Lnya. Tiga komponen penganggaran tersebut yaitu: Pendekatan Penganggaran Terpadu (*unified budget*), Pendekatan Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*medium-term expenditure framework*), dan Pendekatan Penganggaran berdasarkan prestasi kerja/kinerja (*performance-based budget*).

Pendekatan Penganggaran Terpadu merupakan konsep pengintegrasian anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang memuat semua kegiatan instansi pemerintah dalam APBN. Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 80 tahun 2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 (PMK 80/2007), tujuan dari penerapan Penganggaran Terpadu adalah:

- Mewujudkan Satuan Kerja sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya;
- Alokasi dana untuk kegiatan dasar/operasional organisasi mendukung kegiatan penunjang dan prioritas dalam rangka pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan Satuan Kerja yang bersangkutan.
- Adanya akun yang standart untuk satu jenis belanja dipastikan tidak ada duplikasi penggunaannya, sehingga satu jenis belanja hanya untuk satu jenis pengeluaran tertentu.

Pendekatan Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. Menurut PMK 80/2007, tujuan dari penerapan Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah:

- Konsistensi kebijakan anggaran antar waktu melalui kejelasan target jangka menengah dan anggarannya dalam tahap tahunan berikut.

Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan konsep penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Menurut PMK 80/2007, tujuan dari penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja adalah:

- Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja/keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) atas alokasi belanja (*input*) yang ditetapkan;
- Penganggaran disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran;

- Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra kementerian negara/lembaga.

Penerapan tiga komponen penganggaran pada penyusunan RKA-KL Batan diharapkan dalam jangka panjang akan membuat pengelolaan anggaran Batan dapat berjalan secara profesional, transparan dan bertanggungjawab. Penerapan tiga komponen penganggaran dalam penyusunan RKA-KL dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun anggaran 2005 yang merupakan tahun awal penerapan komponen penganggaran, RKA-KL Batan disusun dengan menerapkan pendekatan penganggaran terpadu. Hal ini dilakukan dengan melakukan perubahan pada klasifikasi jenis belanja dari sistem anggaran *dual budgeting*, dimana anggaran belanja negara dipisahkan antara anggaran belanja/pengeluaran rutin dan anggaran/pengeluaran pembangunan menjadi sistem anggaran *unified budgeting*.

Tabel 1.1. Konversi Belanja Negara Menurut Jenis Belanja

Format Lama/Dual Budgeting	Format Baru/Unified Budgeting
I. Belanja Pemerintah Pusat	I. Belanja Pemerintah Pusat
1. Pengeluaran Rutin	
a. Belanja Pegawai	→ a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang	→ b. Belanja Barang
c. Pembayaran Bunga Utang	→ c. Pembayaran Bunga Utang
d. Subsidi	→ d. Subsidi
e. Pengeluaran Rutin Lainnya	→ e. - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial - Belanja Lain-lain
2. Pengeluaran Pembangunan	→ a. <u>Belanja Pegawai</u> b. <u>Belanja Barang</u> c. <u>Belanja Modal</u> d. <u>Belanja Bantuan Sosial</u> e. <u>Belanja Lain-lain</u>
II: Belanja Untuk Daerah	II. Belanja Untuk Daerah
1. Dana Perimbangan	1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Sumber: Kompas, 15 Mei 2005

Sistem penganggaran terpadu memunculkan keberadaan akun yang standart disebut Bagan Akun Standar (BAS). BAS merupakan mata anggaran keluaran (MAK) untuk satu jenis belanja, sehingga satu jenis belanja hanya untuk satu jenis pengeluaran tertentu. Terdapat lebih dari 650 BAS yang disediakan oleh sistem penganggaran terpadu. Hal ini akan dapat memastikan tidak terjadi

duplikasi ataupun tumpang tindih dalam penyediaan dana yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional Batan.

Pada tahun 2006 Batan mulai menerapkan Komponen Pendekatan Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Sistem ini diimplementasikan dalam bentuk perencanaan pembiayaan tiga tahunan pada dokumen RKA-KL, dengan cara penganggaran tahun berjalan ditambah prakiraan penganggaran 2 (dua) tahun mendatang. Peramalan pengeluaran di masa datang didasarkan pada kebijakan dan program yang dilaksanakan hingga saat ini (pendekatan *baseline*). Proyeksi pengeluaran memperhitungkan biaya dari program/kegiatan yang sudah ada hingga saat ini (*on going programs*) serta penghematan (*saving*) dari program/kegiatan yang tidak prioritas. Proyeksi pengeluaran juga memasukkan biaya dari kebijakan dan program baru yang direncanakan bergulir dalam jangka menengah.

Tabel 1.2 Penerapan Pengeluaran Jangka Menengah dalam dokumen RKA-K/L 2006

Tahun Anggaran Berjalan	Tahun Anggaran yg sedang disusun	Prakiraan Maju	
		Y+2	Y+3
Yo 2006	Y+1 2007	Y+2 2008	Y+3 2009

Sumber: PMK 55 tahun 2006

Tahun anggaran 2008 merupakan awal dari penerapan ketiga komponen pendekatan penganggaran tersebut secara bersamaan, di mana Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) juga diterapkan dalam penyusunan RKA-KL Batan. Penerapan PBK diimplementasikan dalam penyertaan tujuan/hasil yang jelas di setiap program, indikator keluaran (*out put*), dan satuan keluaran dan volumenya di setiap kegiatan, serta indikator keluaran, dan satuan keluaran dan volumenya di setiap sub kegiatan pada penyusunan RKA-KL. Selain itu, penyertaan visi dan misi serta hasil yang ingin dicapai juga diikutsertakan pada penyusunan dokumen RKA-KL.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan penerapan tiga komponen penganggaran pada penyusunan RKA-K/L Batan sejak tahun 2008, maka dapat diidentifikasi beberapa persoalan, yaitu:

- belum dievaluasinya perjalanan penerapan tiga komponen penganggaran pada penyusunan RKA-KL Batan;
- belum dievaluasinya pencapaian tujuan-tujuan dari penerapan tiga komponen penganggaran tersebut.

### **1.3 Rumusan Permasalahan**

Penerapan tiga komponen penganggaran pada penyusunan RKA-KL Batan diharapkan dalam jangka panjang akan membuat pengelolaan anggaran Batan dapat berjalan secara profesional, transparan dan bertanggungjawab. Menyadari pentingnya tujuan penerapan tiga komponen penganggaran tersebut maka menjadi penting pula untuk mengetahui bagaimana dan seberapa berhasilnyakah kebijakan tersebut diimplementasikan dalam penyusunan RKA-K/L, maka pokok permasalahan yang akan dianalisis dalam tesis ini adalah:

Apakah penerapan tiga komponen penganggaran dalam penyusunan RKA-KL Batan telah mewujudkan tujuan penerapan sebagaimana yang diharapkan dalam PMK 80/2007?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan Tesis**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu:

Menganalisis implementasi kebijakan penerapan tiga komponen penganggaran pada penyusunan RKA-KL Batan, untuk mencari tahu tujuan apa saja yang telah tercapai dari penerapan tiga komponen tersebut.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a) Memberikan masukan dan saran kepada penyusun penganggaran Batan dalam menerapkan tiga komponen keuangan pada penyusunan anggaran dan kebijakan Batan.
- b) Memberikan kontribusi dan informasi kepada para penanggungjawab program/kegiatan dan anggaran Batan, dalam meningkatkan mutu penyusunan kegiatan dan anggaran Batan

- c) Memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam menganalisa penerapan tiga komponen keuangan pada penyusunan RKA-KL lembaga pemerintah.

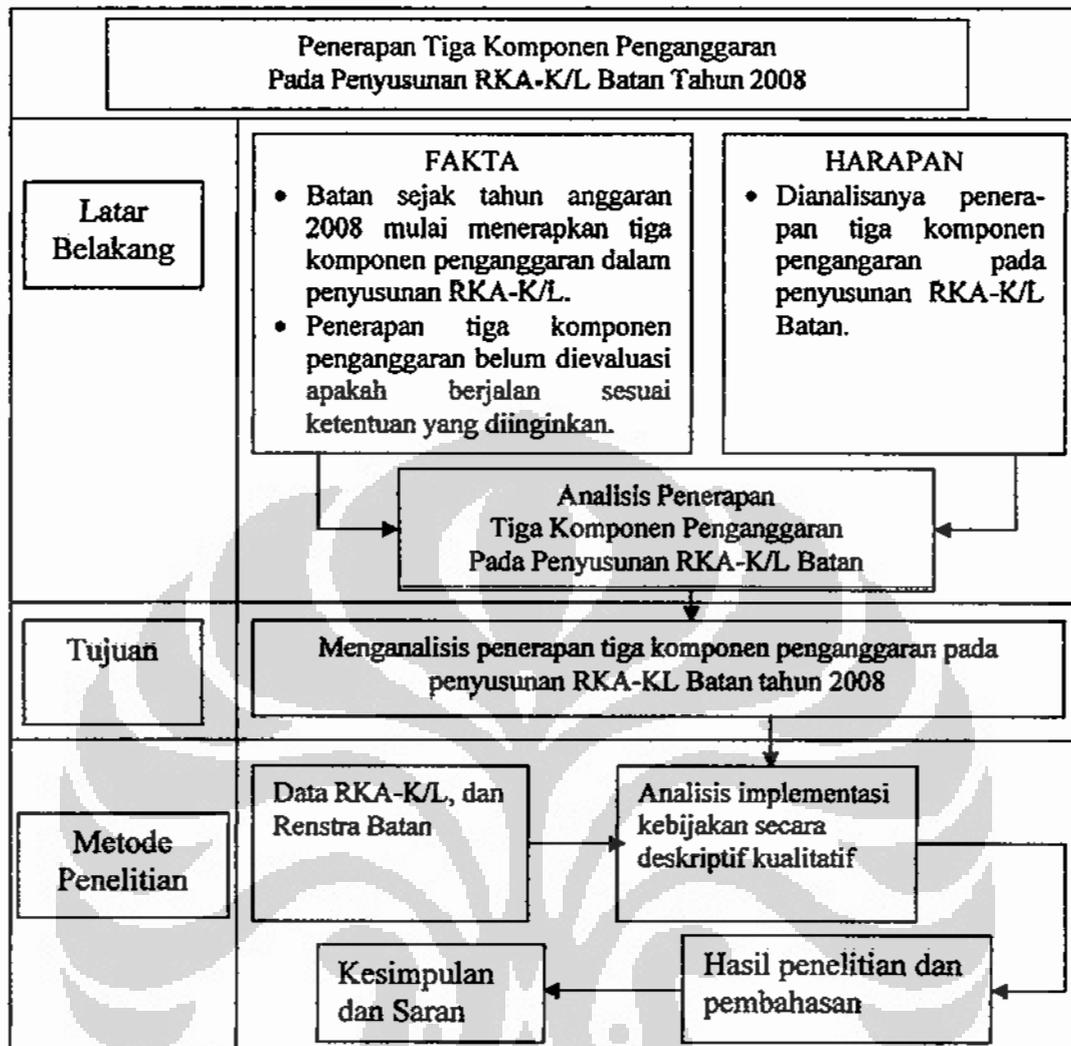
### **1.5 Ruang Lingkup**

Penelitian akan mencakup penyusunan anggaran pada tahun anggaran 2008. Pilihan atas waktu tersebut karena pada tahun anggaran 2008 mulai diterapkan tiga komponen sistem penganggaran yang baru.

Penelitian dalam tesis ini membatasi lingkup permasalahan dengan mengevaluasi indikator-indikator penerapan tiga komponen penganggaran serta pencapaian tujuan-tujuan dari penerapan ketiga komponen tersebut. Indikator penerapan tiga komponen dan pencapaian tujuan-tujuannya dievaluasi berdasarkan hasil dari analisis dan pengolahan data.

### **1.6 Kerangka Berpikir**

Penerapan tiga komponen penganggaran pada penyusunan RKA-K/L merupakan salah satu bentuk kebijakan di bidang keuangan negara yang merupakan bagian dari reformasi Indonesia sejak tahun 1998. Kebijakan ini perlu dianalisa untuk membuktikan dua hal, pertama bahwa penerapan kebijakan tersebut telah benar-benar berjalan secara baik dan sesuai prosedur. Kedua, bahwa penerapan tiga komponen penganggaran tersebut dapat secara nyata mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan dan bertanggungjawab.



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir Analisis Penerapan Tiga Komponen Penganggaran

## 1.7 Metodologi Penelitian

### a. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang berasal dari dokumen RKA-KL Batan dan Laporan Rencana Strategis (Renstra) Batan 2004 – 2009.

Data dari dokumen RKA-K/L Batan tahun 2008 berupa nama-nama Satuan Kerja dan nama-nama Panitia Pengelola dan Penanggungjawab kegiatan; nama dan sasaran program; nama kegiatan, indikaor kegiatan, satuan keluaran dan volume dari kegiatan, serta prakiraan maju dari volume kegiatan dan besaran

anggarnya; nama sub kegiatan, satuan keluaran dan volume dari sub kegiatan, serta prakiraan maju dari volume sub kegiatan; jenis belanja per sub kegiatan dan detil/uraian dari jenis belanja tersebut.

Data dari Renstra Batan berupa pokok-pokok pikir Renstra Batan 2004 – 2009 yang berisi misi, tujuan, sasaran, target, indikator keberhasilan, program Batan, sub program, kegiatan, dan unit pelaksana.

#### **b. Metode Analisis**

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, data yang dihimpun akan dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tabel, gambar dan perhitungan. Langkah pertama adalah menentukan indikator-indikator penerapan yang menentukan keberadaan suatu tujuan (Winarno,2002;169). Indikator-indikator penerapan tersebut disintesis untuk mengetahui dengan data apa indikator tersebut dapat terbaca pada dokumen RKA-K/L. Selanjutnya langkah kedua, yaitu menghubungkan indikator-indikator penerapan dengan tujuan penerapan melalui evaluasi berdasarkan tujuan/*goals-based evaluation* (Lester,2000). Evaluasi ini secara sederhana mengukur apakah tujuan-tujuan suatu kebijakan dapat dicapai melalui sebuah/beberapa indikator/parameter tertentu.

### **I.8 Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini tersusun dalam lima Bab, sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan tesis, hipotesa, ruang lingkup, kerangka berpikir, metodologi, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II Teori dan Tinjauan Literatur**

Bab ini akan menguraikan teori tentang rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, hal-hal yang terkait dengan kaidah penyusunan RKA-K/L serta teori pendekatan penganggaran yaitu: penerapan penganggaran terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Penganggaran Berbasis Kinerja pada instansi pemerintah.

### **Bab III Gambaran Umum**

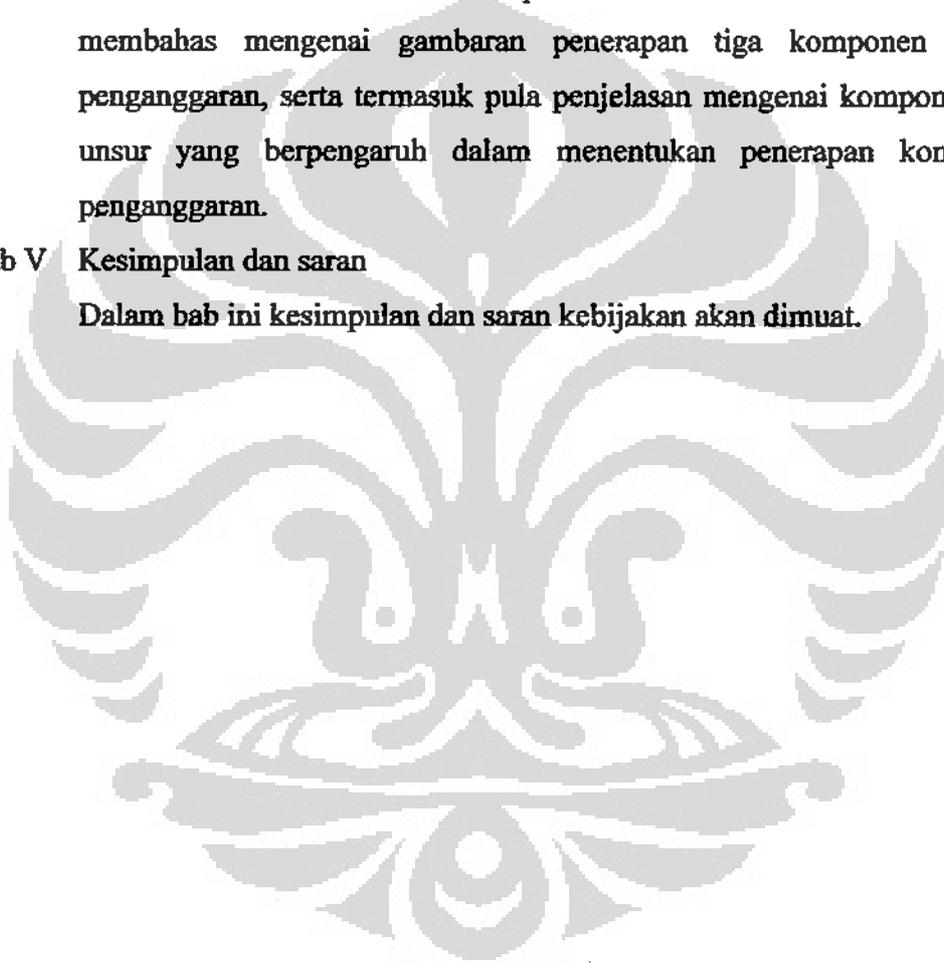
Bab ini akan menjelaskan mengenai proses penyusunan RKA-K/L Batan tahun 2008, kebijakan strategis Batan, serta perencanaan penganggaran Batan. Dibahas pula mengenai implikasi diberlakukannya peraturan mengenai penyusunan anggaran kementerian/lembaga yang baru terhadap proses penyusunan anggaran dalam RKA-K/L.

### **Bab IV Analisis Hasil**

Bab ini berisi uraian analisis dan pembahasan dokumen RKA-K/L, yang membahas mengenai gambaran penerapan tiga komponen sistem penganggaran, serta termasuk pula penjelasan mengenai komponen dan unsur yang berpengaruh dalam menentukan penerapan komponen penganggaran.

### **Bab V Kesimpulan dan saran**

Dalam bab ini kesimpulan dan saran kebijakan akan dimuat.



## **BAB 2**

### **TEORI DAN TINJAUAN LITERATUR RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA-K/L)**

#### **2.1 RKA-K/L dan Perencanaan Penganggaran Negara**

Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri, demikian Abdulkarim (2006) mengutip pendapat Kranenburg. Seluruh sistem dan aturan yang berjalan dari sebuah negara, dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, yang mana tujuan itu merupakan kehendak dari masyarakat atau rakyat. Jadi, setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung kehendak rakyatnya. Meskipun demikian menurut John Locke, sebagaimana dikutip Wattimena (2007), tujuan keberadaan seluruh negara secara umum adalah untuk kebaikan bagi umat manusia.

Keseluruhan proses pencapaian tujuan negara didekati dengan istilah *pembangunan*. Pembangunan, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan yang terukur dan alami (Wrihatnolo dan Nugroho, 2006). Sudjatmoko mengatakan bahwa pembangunan sebagai penjelmaan pergerakan rakyat harus dibimbing secara sadar oleh pemerintah selaku penerima mandat dari rakyat; untuk itu diperlukan upaya dalam merumuskan dan menetapkan arah pembangunan agar pergerakan itu efektif dan efisien (dikutip Wrihatnolo dan Nugroho dalam Manajemen Pembangunan Indonesia, 2006).

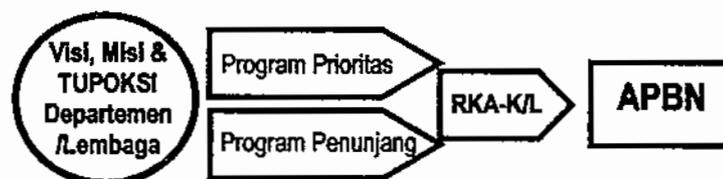
Alat utama pemerintah dalam menetapkan arah pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang memuat daftar sistematis dan terperinci rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.

APBN merupakan anggaran negara yang menjadi bentuk representasi komitmen pemerintah Indonesia kepada rakyatnya. Sebagai bagian dari sebuah perencanaan negara yang diarahkan pada perwujudan tujuan negara<sup>1</sup>, maka APBN merupakan sintesa dari kehendak rakyat. APBN disusun berdasarkan masukan berupa usulan program kegiatan dan anggarannya dari seluruh kementerian

---

<sup>1</sup> Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 pasal 7 ayat 2

negara/lembaga negara yang *notabene* merupakan perangkat ataupun sistem yang dibuat untuk melaksanakan amanat rakyat dalam mewujudkan cita-cita negara.



Gambar 2.1. Skema Penyusunan APBN

Sumber: PMK nomor 80 tahun 2007; telah diolah kembali

APBN disusun berdasarkan masukan dari kementerian negara/lembaga berupa rencana kegiatan/kerja disertai anggarannya. Rencana kegiatan tersebut dibuat dalam sebuah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). Seluruh kementerian negara dan lembaga pemerintah wajib menyusun dokumen RKA-K/L, berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 [UU 17/2003] pasal 14 ayat 1, yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

RKA-K/L adalah dokumen rencana program kegiatan kementerian negara/lembaga disertai anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana program kegiatan tersebut. Selain sebagai dasar bagi penyusunan RAN, Dokumen RKA-K/L juga merupakan dasar bagi kementerian negara/lembaga dalam menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang dengan DIPA tersebut, kementerian negara/lembaga dapat mencairkan anggaran guna membiayai program kegiatannya.

RKA-K/L secara garis besar terdiri dari 2 muatan. *Pertama*: rencana kerja kementerian negara/lembaga yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan hasilnya yang diharapkan, serta kegiatan dan keluaran yang diharapkan. *Kedua*: anggaran yang diperlukan, berisi uraian biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dana dan sasaran pendapatan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

## 2.2. Kaidah Penyusunan RKA-K/L

Dokumen RKA-K/L merupakan hasil dari sebuah proses perencanaan penganggaran. Sebuah dokumen RKA-K/L tidak akan lepas dari bingkai pemahaman akan anggaran dan prinsip-prinsip yang terkait dengannya.

Lal (2000;31) mendefinisikan anggaran sebagai ekspresi keuangan dan narasi dari hasil yang ingin dicapai atas keputusan sebuah perencanaan. Suatu rencana mendefinisikan tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan yang ingin dilakukan untuk mencapainya, sedangkan anggaran adalah bentuk kuantitatif dari rencana tersebut; dinyatakan dalam istilah fisik atau keuangan atau keduanya (Hansen dan Mowen, 1997). Lebih lanjut lagi, Welsch (1981) mengaitkan peran anggaran dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi dan pengawasan; sehingga ruang lingkup peran anggaran mencakup perencanaan, mengarahkan, mengorganisasi dan mengawasi setiap satuan kerja dan bidang-bidang di dalam suatu organisasi. Anthony dan Govindarajan (2000) menambahkan peran anggaran sebagai cerminan pernyataan komitmen antara pembuatnya dengan atasannya. RKA-K/L memainkan dirinya dalam ke-semua peran di atas.

Untuk dapat mewujudkan suatu anggaran yang mendukung tercapainya tujuan, maka proses penganggaran harus memiliki prinsip-prinsip penganggaran. Jones dan Pendlebury (1996) mengangkat prinsip ekonomis, efisien dan efektif sebagai tiga prinsip dasar suatu penganggaran. Agere (2000), memperkenalkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sementara Syafritz dan Russell (1997) mengungkapkan prinsip-prinsip yang menurut mereka telah mengacu pada perkembangan terakhir masyarakat, yaitu: demokratis, adil, transparan, bermoral tinggi, hati-hati, dan akuntabel.

Prinsip ekonomis dalam penyusunan RKA-K/L berkaitan dengan *input*, dimana anggaran yang digunakan harus sehemat mungkin sesuai dengan kebutuhan, tidak ditambah-tambah tidak pula dikurang-kurang. Prinsip efektif dalam penyusunan RKA-K/L berkaitan dengan *output*, dimana output yang dihasilkan sesuai dalam jumlah dan kualitas. Prinsip efisien dalam penyusunan RKA-K/L berhubungan dengan perbandingan jumlah *output* dan jumlah *input*, semakin besar perbandingan *output* dan *input*, semakin efisien suatu kegiatan.

Prinsip akuntabilitas mengharuskan dokumen RKA-K/L sebagai dokumen yang tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi menghendaki dokumen RKA-K/L sebagai dokumen yang terungkap, terbaca dan dapat dinilai oleh mereka yang berkepentingan. Prinsip partisipatif menghendaki agar publik dapat memberikan masukan dan saran terhadap penyusunan dokumen RKA-K/L.

Prinsip demokratis menghendaki agar penyusunan RKA-K/L mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Prinsip adil menghendaki agar RKA-K/L disusun secara proporsional dan profesional. Prinsip bermoral tinggi menghendaki agar penyusunan RKA-K/L berlandaskan keinginan dan tujuan yang baik. Prinsip hati-hati menghendaki agar penyusunan RKA-K/L dilakukan secara bijak dan cermat.

### 2.3. Pendekatan Sistem Penganggaran

Sesuai amanat Undang-Undang tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa proses penganggaran menggunakan tiga komponen pendekatan penganggaran : Pendekatan Penganggaran Terpadu, Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja. Karena itu RKA-K/L disusun dengan menggunakan ketiga pendekatan penganggaran tersebut.

#### 2.3.1. Komponen Pendekatan Penganggaran Terpadu

Penganggaran Terpadu atau *Unified Budget* adalah konsep pengintegrasian anggaran belanja yang komprehensif yang memuat semua kegiatan pemerintah (Meyers, 1996). Hal senada diutarakan Schick dan LoStracco dalam bukunya yang berjudul *The federal budget, politics, policy, process*. Mereka mendefinisikan Unified budget sebagai: *a comprehensive budget that includes all receipts and outlay from federal fund and trust fund* (Schick dan Stracco, 2007: 296).

Konsep *unified budget*, pertama kali digunakan oleh Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1968 dalam bentuk mengkonsolidasikan antara *on-budget* dan *off-budget*. *On-budget* adalah seluruh rencana pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang disahkan melalui prosedur pembahasan oleh lembaga legislatif, dalam hal ini adalah Kongres Amerika. Sementara, *off-budget* adalah anggaran

yang dibiayai dengan *dedicated fund*, serta tidak dibahas oleh lembaga legislatif setiap tahunnya. Contoh dari *off-budget* adalah alokasi dana yang diperuntukkan bagi program pensiun dan tunjangan hari tua. Pada umumnya *on-budget* mengalami *deficit*, yaitu rencana pengeluaran melebihi anggaran penerimaan. Sedangkan *off-budget* mengalami *surplus*, yaitu penerimaan pemerintah diproyeksikan dapat lebih tinggi dari rencana pengeluaran.

Ada beberapa kelebihan dari *unified budget* menurut *President's Commission on Budget Concepts* sebagaimana dikutip Schick dan LoStracco, yaitu: *unified budgets* memberikan gambaran yang lebih lengkap transaksi keuangan, memfasilitasi penggunaan anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi, dan memungkinkan pemerintah untuk menetapkan prioritas di antara program-program yang dibiayai oleh berbagai sumber. (Schick dan Stracco, 2007: 40).

Pendekatan komponen penganggaran terpadu di Indonesia dipraktekkan dengan memadukan antara belanja rutin dan belanja pembangunan ke dalam satu konsep perencanaan keuangan, satu dokumen penganggaran dan satu proses penyusunan dan penelaahan anggaran.

Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut "rutin" karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran rutin antara lain belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan pemeliharaan. Dalam Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1969, dinyatakan bahwa "Anggaran belanja rutin memuat seluruh pengeluaran aparatur pemerintah sehari-hari yang tiap tahun diperlukan untuk mengamankan dalam menjamin kelangsungan tugas dan kewajiban secara efektif." Belanja rutin dibagi 4( empat) yaitu: belanja pegawai, adalah semua pengeluaran yang langsung berhubungan dengan pegawai dan menjadi penghasilan bagi pegawai baik berupa uang maupun dalam bentuk barang pangan; belanja barang, adalah semua pengeluaran yang langsung di dimanfaatkan untuk keperluan kantor baik untuk keperluan sehari-hari maupun inventaris kantor atau pengeluaran yang berbentuk langganan dan jasa maupun dalam bentuk pengeluaran lainnya; Biaya Pemeliharaan, adalah pengeluaran untuk pemanfaatan

mempertahankan daya guna, baik berupa barang-barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dalam rangka kelangsungan tugas dan kewajiban pemerintah; dan biaya perjalanan dinas, adalah pengeluaran untuk perjalanan dinas biasa dalam rangka operasional dan pengawasan ke daerah-daerah. Jadi anggaran rutin adalah suatu anggaran yang diberikan setiap tahun yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan untuk kelancaran kegiatan pemerintah sehari-hari, dikeluarkan untuk melayani kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu dalam anggaran rutin perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang mendapat prioritas, guna membiayai kegiatan pelaksanaan pada pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat (Hasyim, 2009)

Belanja pembangunan diartikan sebagai pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan menambah aset atau kekayaan bagi negara, yang selanjutnya dapat menambah beban anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya. Esensi belanja pembangunan yaitu, investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan mempunyai *impact* ekonomis atau memberikan nilai tambah. Pemahaman bahwa belanja pembangunan adalah pembangunan fisik merupakan pemahaman yang bias dan lepas dari patokan dasar apakah pengeluaran tersebut menghasilkan produk yang dapat memberikan nilai tambah atau tidak. Suatu pekerjaan yang dibiayai anggaran pembangunan jika tidak mempunyai dua hal tersebut maka pekerjaan itu secara prinsip, tidak termasuk dalam anggaran pembangunan (Rudy, 2009).

Sebelumnya pemerintah melaksanakan sistem anggaran *dual budgeting*, di mana anggaran belanja negara dipisahkan antara anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Hal ini dilakukan dalam rangka penekanan akan arti pembangunan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kelemahan dalam sistem anggaran *dual budgeting* ini.

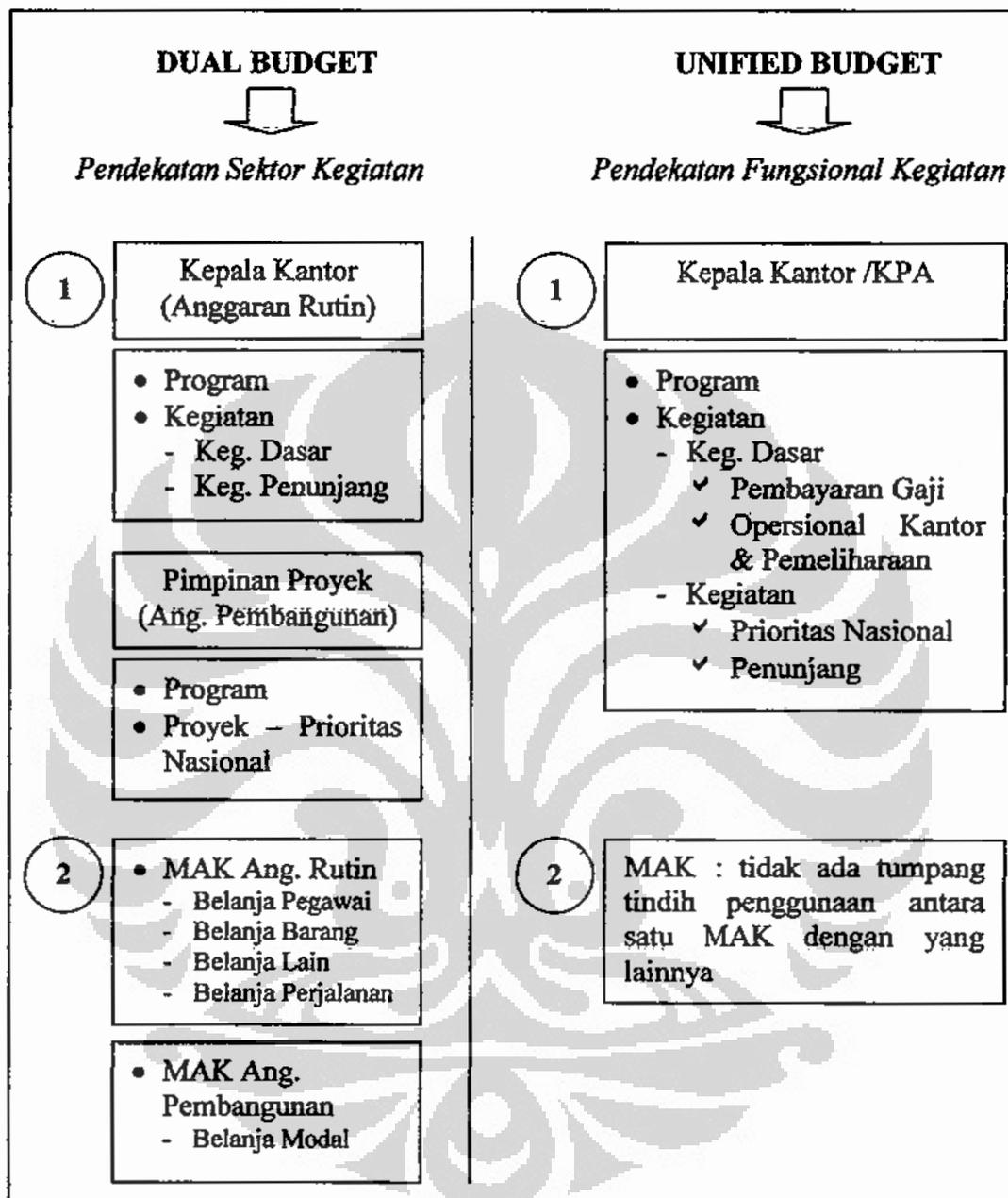
Kelemahan pertama, terjadinya duplikasi antara belanja rutin dan belanja pembangunan karena kurang tegasnya pemisahan antara kegiatan operasional perkantoran dengan proyek/pembangunan, khususnya proyek-proyek nonfisik/non prasik. Hal ini berdampak pada kesulitan mengukur kinerja karena alokasi dana yang ada tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Kedua, sistem *dual budgeting* menyebabkan terjadinya dualisme penyusunan mata anggaran

keluaran (MAK) karena untuk satu jenis belanja, ada MAK yang diperuntukkan bagi belanja rutin dan ada MAK lain yang digunakan untuk belanja pembangunan. Ketiga, analisis belanja dan biaya program sulit dilakukan disebabkan anggaran belanja rutin tidak terbatas pada pengeluaran untuk operasional; begitupun belanja anggaran pembangunan tidak dibatasi pada pengeluaran untuk investasi. Keempat, proyek yang menerima anggaran pembangunan diperlakukan sama dengan satuan kerja, yaitu sebagai entitas akuntansi walaupun proyek hanya bersifat sementara. Jika proyek sudah selesai atau dihentikan, tidak ada kesinambungan dalam pertanggungjawaban terhadap aset dan kewajiban yang dimiliki proyek tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakefisienan dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan juga menyebabkan ketidakjelasan keterkaitan antara keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dicapai dengan penganggaran lembaga (Abimanyu, 2005).

Penganggaran terpadu mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang memuat semua kegiatan instansi pemerintah dalam APBN. Hal ini menyebabkan tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk kementerian negara/lembaga baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. Dalam PMK 80/2007 dikatakan bahwa penganggaran terpadu meliputi: keterpaduan pengelolaan kegiatan, keterpaduan jenis belanja dalam satu kegiatan, keterpaduan antar program dan kegiatan sesuai fungsi dari suatu kementerian negara/lembaga, keterpaduan program dan kegiatan antar kementerian negara/lembaga dan keterpaduan program dan kegiatan antar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Dengan penerapan penganggaran terpadu maka Satuan Kerja menjadi satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya. Disamping itu, alokasi dana untuk kegiatan dasar dan operasional benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan penunjang dan prioritas dalam rangka pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan satuan kerja yang bersangkutan; dan dengan adanya akun yang standart untuk satu jenis belanja maka dipastikan tidak ada duplikasi penggunaan, sehingga satu jenis belanja hanya untuk satu jenis pengeluaran tertentu.

Gambaran kerangka ideal yang diharapkan dalam penganggaran terpadu adalah sebagaimana digambarkan dalam Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Kerangka Ideal Penganggaran Terpadu

Sumber: PMK nomor 80 tahun 2007

### 2.3.2. Komponen Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau *Medium Term Expenditure Framework* adalah sebuah kerangka berpikir yang mensinergikan antara perencanaan (dari sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah), pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara untuk tahun bersangkutan dan beberapa tahun yang akan datang (Gray, 1998). Tujuan utama dari KPJM adalah untuk menjamin konsistensi kebijakan anggaran antar waktu melalui kejelasan target jangka menengah dan anggarannya dalam tahap tahunan berikut.

Pendekatan KPJM muncul sebagai pendekatan yang berkontribusi terhadap perbaikan atas masalah-masalah fiskal yaitu ketidakseimbangan antara sumber daya yang tersedia dengan pengeluaran Pemerintah. Oleh karena itu pendekatan ini memberikan suatu analisa terhadap strategi fiskal dan mekanisme untuk mengembangkan prioritas-prioritas pembangunan. Dalam aplikasinya, pendekatan KPJM ini digunakan sebagai alat yang berguna untuk meningkatkan efisiensi atas proses alokasi sumber daya. Pendekatan ini juga memberikan proyeksi atas hasil fiskal untuk berbagai alternatif kondisi ekonomi sehingga tercipta stabilitas dan kontinuitas dalam proses anggaran (Medina, 2009).

Pendekatan secara holistik ini menurut Treasury Guidelines Republic of South Africa, lebih baik dari ciri model penganggaran lama yang reaktif dan menggunakan kebijakan yang bersifat *shortterm*. Ada tiga keunggulan KPJM, yaitu: pertama, KPJM meningkatkan stabilitas dengan mendorong kementerian negara/departemen mengetahui sumber daya apa yang kemungkinan akan tersedia bagi mereka. Hal ini memungkinkan perencanaan pemerintah agar lebih kredibel dan akurat. Ke-dua, KPJM mendorong investasi, melalui kebijakan pajak, suku bunga, dan belanja pemerintah yang lebih dapat diprediksi. Ke-tiga, KPJM dapat meningkatkan transparansi. Mencantumkan pengeluaran masa depan memberikan sinyal kepada masyarakat luas mengenai prioritas pemerintah dan bagaimana melaksanakan maksud tersebut. Ke-empat, KPJM memfasilitasi program evaluasi. Prediksi masa depan juga menyediakan dasar untuk menilai efektivitas program tahun lalu (Treasury Guidelines, 2008).

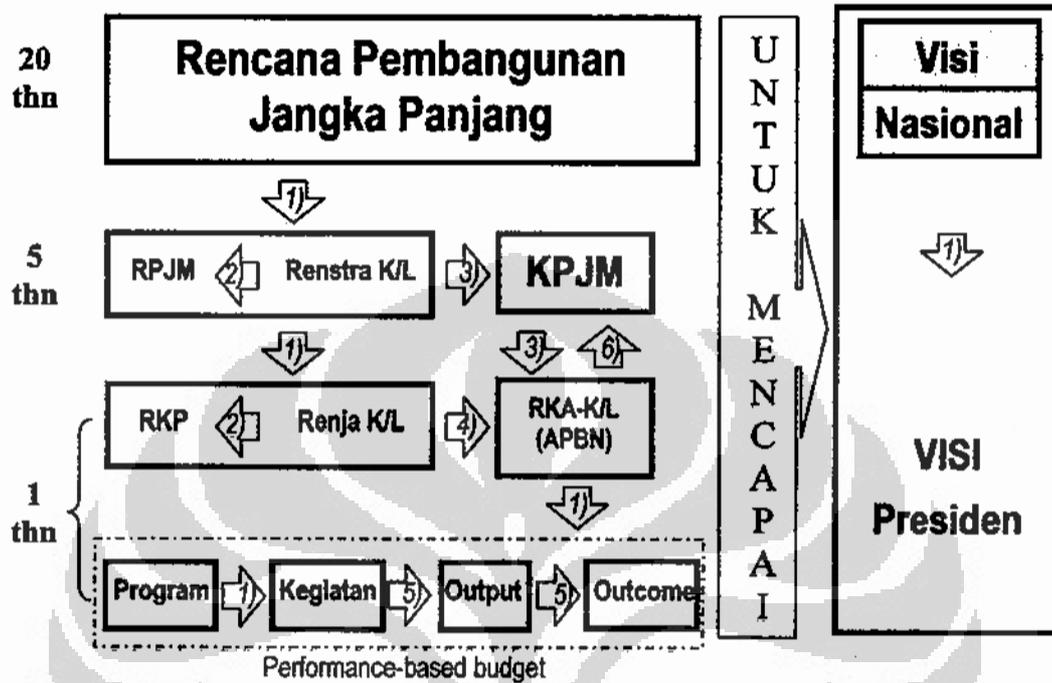
Menurut Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-K/L (PP 21/2004), KPJM merupakan pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perkiraan maju.

KPJM dapat dipandang sebagai suatu proyeksi pengeluaran selama beberapa tahun ke depan. Proyeksi pengeluaran tersebut mencerminkan: (i) dampak dari kebijakan atau program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya; (ii) rasionalisasi pengeluaran dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan (*saving*); (iii) ruang gerak untuk menampung kebijakan baru (*new policies*).

Dalam penyusunan anggaran menggunakan pendekatan KPJM, kegiatan dan program harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing kementerian negara/lembaga. Dalam PMK 80/2007, hal tersebut dilakukan dengan: (i) mengaitkan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan; (ii) mengendalikan pengambilan keputusan penentuan prioritas program dalam kendala keterbatasan anggaran dengan mengacu kepada sasaran program, biaya yang sesuai, dan informasi hasil evaluasi dan monitoring; (iii) memberikan media berkompetisi bagi kebijakan, program, dan kegiatan; (iv) meningkatkan kapasitas dan kesediaan penyesuaian prioritas program dan kegiatan sesuai alokasi sumber daya yang disetujui legislatif.

Dengan pendekatan KPJM maka penyusunan penganggaran diharapkan akan dapat meningkatkan keseimbangan makroekonomi dengan mengembangkan kerangka ketersediaan dana yang konsisten dan realistis serta mampu memperbaiki alokasi pendanaan yang sesuai dengan prioritas yang hendak dicapai. KPJM juga akan mampu meningkatkan kepastian akan alokasi atas kebutuhan yang bersifat multiyears serta memberi *hardbudget constraint* untuk belanja (Taliercio, 2007).

Secara umum, konsep dasar KPJM dalam RKA-K/L dapat digambarkan dalam diagram berikut:



1) dijabarkan 2) dirangkum 3) indikasi pendanaan 4) kepastian pendanaan 5) menghasilkan 6) proyeksi ke depan

Gambar 2.3. Diagram Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Sumber: PMK nomor: 80 tahun 2007

### 2.3.3. Komponen Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) atau *Performance Base Budgeting* adalah jenis anggaran yang pengeluarannya dihitung berdasarkan nilai output dan outcomes-nya. Maksudnya, semua kegiatan dan proyek yang dibiayai dengan unit cost tertentu, output dan outcome bahkan dampaknya harus dapat dihitung dan diukur serta harus sesuai dengan nilai biaya yang dikeluarkan (Nurcholis, 2005:180). Dalam kaitannya dengan anggaran negara maka PBK merupakan anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan (*output* dan *outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. PBK dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan *output* dan *outcome* yang jelas sesuai dengan prioritas

nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas (Sancoko dkk, 2008).

PBK merupakan penyusunan anggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini akan terlihat bila penyusunan anggaran mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja yang tercermin pada satuan keluaran (*output*) yang terukur. Sinkronisasi program, kegiatan, dan sub-kegiatan terhadap kebijakan yang melandasinya menjadi langkah yang sangat penting menuju penganggaran berbasis kinerja, karena penataan program, kegiatan, dan sub-kegiatan akan memastikan bahwa kegiatan/sub-kegiatan yang diusulkan benar-benar akan menghasilkan keluaran (*output*) yang mendukung pencapaian sasaran program, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

PBK akan menghubungkan antara keluaran dengan hasil/dampak yang disertai penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan. Hal ini akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan. PMK 80/2007 merinci maksud dan tujuan PBK sebagai berikut:

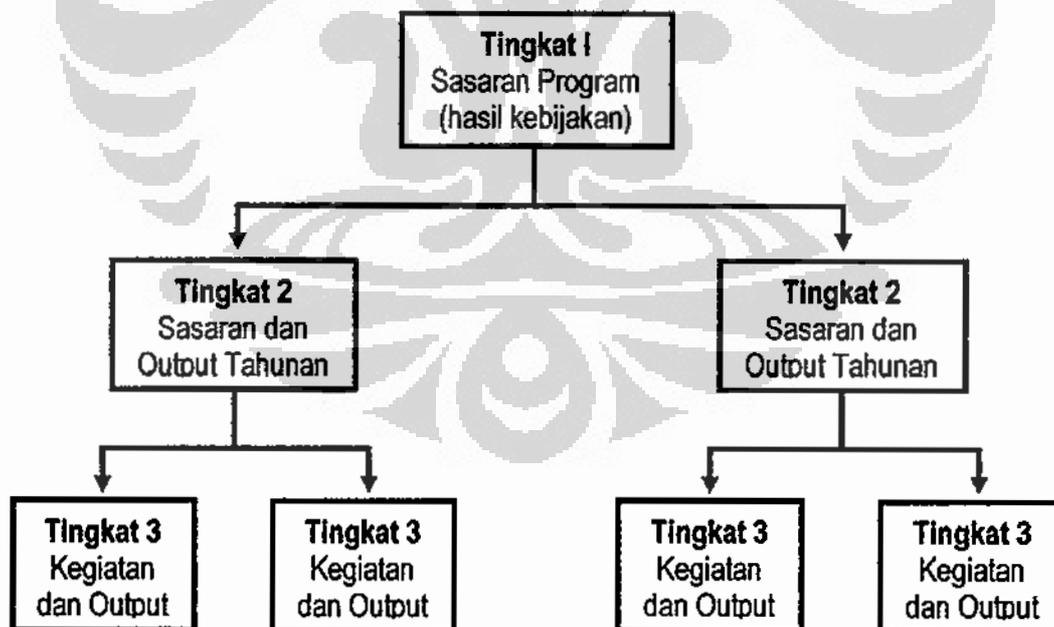
- i) Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dan dampak (*outcome*) atas alokasi belanja (*input*) yang ditetapkan;
- ii) Program dan kegiatan disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran;
- iii) Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra kementerian negara/lembaga.

Dari tujuan PBK di atas, maka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga diharapkan disusun berdasarkan visi dan misi (*renstra*) kementerian negara/lembaga sesuai sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran dengan mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dan dampak (*outcome*) atas alokasi belanja (*input*) yang ditetapkan, di mana di dalamnya terdapat keterkaitan antara *output* kegiatan dan sasaran program (*cascade*) serta terdapat pula kepastian penanggung jawab keberhasilan suatu program/kegiatan. Di samping itu, penyusunan anggaran harus pula

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

PBK akan mengubah fokus pengukuran pencapaian program/kegiatan dari besaran alokasi sumber daya bergeser kepada hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya. Indikator pengukuran kinerja terdiri dari: (i) *input indicator* yang dimaksud untuk melaporkan jumlah sumber daya yang digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan atau program; (ii) *output indicator*, dimaksudkan melaporkan unit barang/jasa yang dihasilkan suatu kegiatan atau program; (iii) *outcome/effectiveness indicator*, dimaksudkan untuk melaporkan hasil (termasuk kualitas pelayanan).

Dalam dokumen RKA-K/L, penerapan PBK dinyatakan berupa: kebijakan dan hasil yang diharapkan dari suatu program (dokumen tingkat 1), kondisi yang diinginkan untuk mencapai sasaran program berupa output dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan (dokumen tingkat 2), dan kegiatan dan keluarannya beserta masukan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan (dokumen tingkat 3). Ilustrasi penerapan PBK dalam dokumen RKA-K/L adalah seperti berikut:



Gambar 2.4. Diagram Alur Informasi Dalam Dokumen Rencana Anggaran

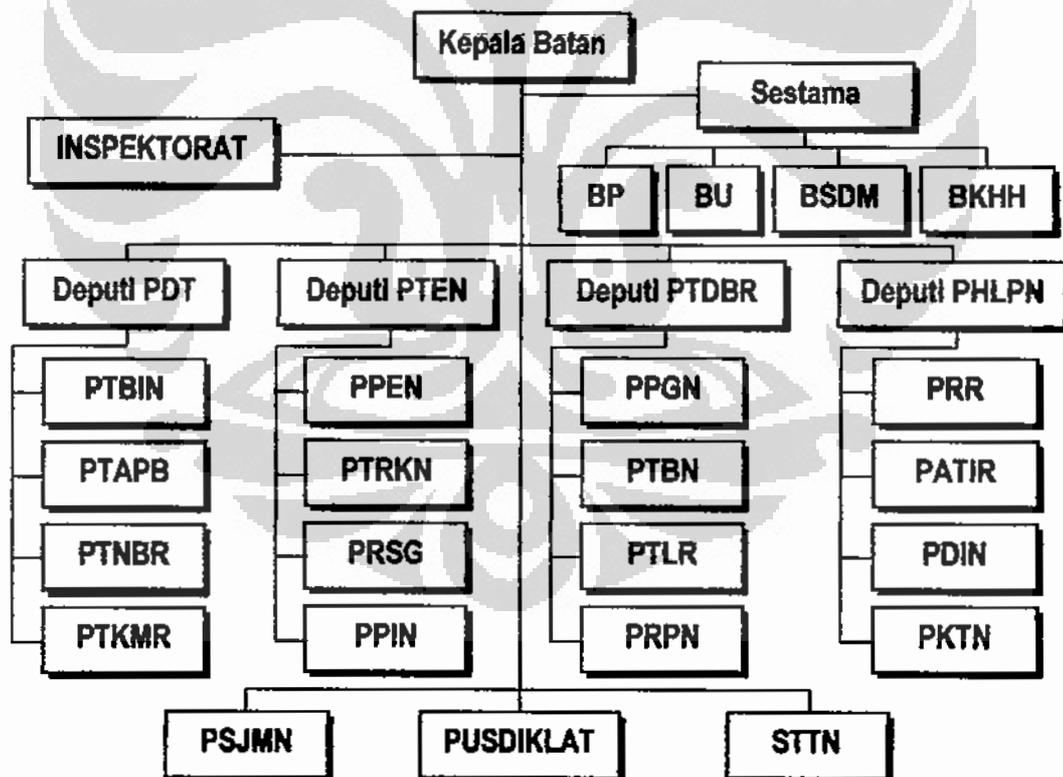
Sumber: PMK nomor 80 tahun 2007

### BAB 3 GAMBARAN UMUM PENYUSUNAN RKA-K/L BATAN

Bab 3 ini akan menguraikan gambaran umum penerapan aturan yang berkaitan dengan proses perencanaan penganggaran di Batan, khususnya dalam hal perencanaan penyusunan RKA-K/L Batan. Pembahasan dalam Bab ini diawali dengan menjelaskan tentang gambaran kebijakan strategik Batan yang mana merupakan dasar dalam penyusunan perencanaan anggaran Batan.

#### 3.1 Kebijakan Strategik Batan

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan wewenang yang diberikan melalui Undang-Undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Batan

sumber: Buku Rencana Strategik Batan 2004 – 2009

Batan dipimpin oleh seorang kepala Batan. yang dibantu oleh 4 orang Deputi Kepala dan seorang Sekretaris Utama/Sestama (setingkat Eselon I) serta 4 orang pejabat eselon II yaitu: Kepala Pusat Standarisasi dan Jaminan Mutu Nuklir (PSJMN), Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Kepala Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN), dan Inspektur. Setiap Deputi Batan membawahi pusat-pusat teknis (setingkat Eselon II) dengan tugas melakukan penelitian, pengembangan dan perekayasa (Litbangyasa), serta pendayagunaan dan pemasyarakatan hasil litbangyasa iptek nuklir. Sekretaris Utama membawahi biro-biro (setingkat Eselon II) dengan tugas dan fungsi utama mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Batan. Kepala Batan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

### 3.1.1. Wewenang, Visi, dan Misi Batan

Dokumen Rencana Strategik Batan 2004 – 2009 menyebutkan 4 wewenang Batan, yaitu: (i) menyusun Rencana Nasional secara makro di bidang ketenaganukliran; (ii) merumuskan kebijakan di bidang ketenaganukliran untuk mendukung pembangunan secara makro; (iii) merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam program penelitian dasara dan terapan, pengembangan teknologi dan energi nuklir, pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa, serta pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; (iv) menetapkan pedoman penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dan penggunaan tenaga nuklir.

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta wawasan masa depan yang diharapkan, maka Batan memiliki visi, misi, prinsip dan nilai-nilai sebagai berikut<sup>1</sup>:

- Visi : terwujudnya iptek nuklir berkeselamatan handal sebagai pemicu dan pemacu kesejahteraan.
- Misi : melaksanakan litbangyasa iptek nuklir bidang energi dan non energi; melakukan diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir; melaksanakan kegiatan demi kepuasan pemangku kepentingan.

<sup>1</sup> Sumber: Dokumen Rencana Strategik Batan 2004 – 2009

- Prinsip : segenap kegiatan iptek nuklir dilaksanakan secara profesional untuk tujuan damai dengan mengutamakan prinsip keselamatan dan keamanan serta keletarian lingkungan dengan dilandasi nilai-nilai: *visionary, innovative, excellent, dan accountable*; kejujuran, kedisiplinan, keterbukaan, tanggung jawab, kreatif dan kesetiakawanan; serta berpegang kepada pedoman Batan yaitu: berjiwa pioner, bertradisi ilmiah, berorientasi industri, mengutamakan keselamatan dan komunikatif.

### 3.1.2. Fokus Program (Landmark) Batan

Batan merumuskan perannya pada fokus program RPJM ke dalam 4 bidang Sasaran Program Batan, yaitu: Pangan (Pertanian/peternakan), Energi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Obat-obatan.

Tabel 3.1. Fokus Program dan Indikator keberhasilan Batan

No	Fokus Program Batan	Jangka Pendek, tahun pencapaian	Jangka Menengah/Panjang, tahun pencapaian
1	Pangan (pertanian/ Peternakan)	1. 10% jumlah varietas unggul tanaman pangan nasional & penambahan jenis suplemen pakan ternak, serta ketersediaannya secara berkelanjutan, 2004	1. Pusat Acuan dan Rujukan Nasional dalam Aplikasi Teknologi Isotop Radiasi di Bidang Pertanian dan Peternakan, 2008
2	Energi	2. Masuknya opsi nuklir sebagai bagian dari energi nasional jangka panjang, 2004. 3. Menjadi pusat acuan regional dalam pemanfaatan teknik nuklir untuk eksplorasi panas bumi, 2005. Pusat acuan dan layanan teknik nuklir untuk manajemen air, 2009. 4. <i>Engineering design demonstration plan</i> Mesin Berkas Elektron untuk de-Sox dan de-Nox PLTU fosil, 2007	2. <i>Science and Technology Base (STB)</i> Bidang Energi Nuklir, 2010. 3. Reaktor daya nuklir pertama dioperasikan di Indonesia (Sistem Jaringan Jawa-Bali), 2016. 4. Fasilitas nasional pelayanan pengelolaan limbah radioaktif (non PLTN), 2007. Persiapan design fasilitas PLTN, 2008. pengoperasian fasilitas, 2016. 5. tersedianya data cadangan Uranium kategori terukur yang signifikan, 2015.

No	Fokus Program Batan	Jangka Pendek, tahun pencapaian	Jangka Menengah/Panjang, tahun pencapaian
3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	5. Teknologi informatika yang handal dalam bidang: simulasi/modeling, perpustakaan digital dan manajemen SDM, 2005	6. Pusat Informasi di bidang teknologi nuklir dalam rangka <i>public information and education</i> , pengembangan metode komputasi, pemodelan, simulasi komputer, dan preservasi pengetahuan nuklir, 2010.
4	Kesehatan dan Obat-obatan	6. Perangkat teknologi nuklir untuk penanggulangan penyakit kanker dan infeksi bakteri, 2005.	7. Pusat Acuan dan Kepakaran Kesehatan Masyarakat berbasis Teknologi Nuklir, 2010. 8. Pusat Acuan rancang bangun dan perawatan perangkat nuklir di bidang kesehatan, keselamatan nuklir, dan industri, 2008.

sumber: Buku Rencana Strategik Batan 2004 – 2009

Untuk mencapai tujuan iptek nuklir dan melaksanakan fokus program tersebut di atas, maka dalam Renstra Batan 2004-2009 ditetapkan 3 Garis Besar Kebijakan Strategik Batan sebagai berikut:

- (i) Meningkatkan peran Batan dalam kegiatan litbangyasa serta penguatan kompetensi iptek nuklir, di bidang: produksi dan aplikasi isotop dan radiasi; daur bahan bakar nuklir dan limbah radioaktif serta pelayanan pengelolaan limbah radioaktif; pemanfaatan reaktor dan fasilitas nuklir lain; pemanfaatan instrumentasi nuklir; serta pelayanan keselamatan nuklir dan radiasi.
- (ii) Melaksanakan pelayanan dan diseminasi teknologi dan kerjasama hasil litbangyasa iptek nuklir, melalui: kegiatan pelayanan, inovasi, alih teknologi, kerjasama, kemitraan, sosialisasi dan promosi hasil litbang iptek nuklir. Langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah: identifikasi, seleksi, dan inovasi hasil-hasil litbangyasa sesuai dengan kebutuhan pasar; uji kelayakan mutu, standarisasi produk, aspek keamanan dan aspek ekonomis; menjalin dan menggalang kemitraan dengan pihak pemda, swasta atau investor untuk mewujudkan komersialisasi pendayagunaan iptek nuklir serta melayani kebutuhan masyarakat.

(iii) Melakukan penguatan kelembagaan dengan tujuan membangun kinerja kelembagaan Batan dan mitra kerja yang kuat, didukung oleh SDM profesional dan ahli dalam bidang iptek nuklir, tersedianya sarana dan prasarana litbangyasa yang handal, serta dikendalikan oleh sistem manajemen mutu yang efektif, produktif dan efisien serta mengutamakan budaya kerja dan budaya keselamatan, dengan mengutamakan kepuasan layanan bagi pemangku kepentingan.

Berdasarkan kebijakan strategik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, maka disusunlah program Batan seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel. 3.2. Program dan Kegiatan Batan

<b>Program Batan</b>	
a.	<b>Program Utama Bidang Energi</b> 1. Perencanaan dan pengembangan sistem energi nuklir 2. Pengembangan teknologi pengelolaan limbah radioaktif 3. Pengembangan teknologi bahan nuklir 4. Pengembangan teknologi reaktor 5. Pengembangan teknologi bahan industri nuklir 6. Pengembangan teknologi bahan galian nuklir 7. Pengembangan teknologi rekayasa perangkat nuklir
b.	<b>Program Utama Bidang Non Energi</b> 8. Pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi 9. Pemantauan dan evaluasi radioaktivitas lingkungan dan limbah B3 10. Pengembangan teknologi di bidang instrumentasi perangkat nuklir 11. Pengembangan teknologi proses produksi radioaktif dan radiofarmaka
c.	<b>Program Diseminasi Teknologi dan Kemitraan</b> 12. Diseminasi hasil litbang iptek nuklir 13. Kemitraan
d.	<b>Program Pelayanan Teknologi Nuklir</b> 14. Pelayanan fasilitas dan aplikasi teknik nuklir
e.	<b>Program Manajemen Kelembagaan</b> 15. Manajemen operasional kelembagaan 16. Jaminan mutu

sumber: Buku Rencana Strategik Batan 2004 – 2009

### 3.2. Perencanaan Penganggaran Batan

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi Batan, maka rencana strategis dan fokus program Batan dijabarkan melalui perencanaan penganggaran Batan agar dapat dibiayai. Perencanaan penganggaran, merupakan bagian dari siklus penganggaran Batan. Siklus penganggaran Batan dimulai dari tahap penyusunan dan pengajuan, kemudian tahap pembahasan dan persetujuan, lalu tahap pelaksanaan anggaran, selanjutnya tahap pemeriksaan anggaran dan akuntansi. Siklus ini sama dengan siklus penganggaran pemerintah, kecuali pada siklus pemerintah ditambah satu siklus terakhir yaitu tahap persetujuan DPR atas perhitungan anggaran negara (Halim, 2002).

Perencanaan penganggaran Batan dimanifestasikan pada proses perencanaan RKA-K/L Batan. Proses ini melibatkan secara langsung setidaknya 3 *stake holder*, yaitu: Satuan Kerja-Satuan Kerja di Batan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Biro Perencanaan Batan selaku penanggung jawab pelaksanaan penyusunan anggaran Batan, dan Departemen Keuangan –dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbandaharaan, masing-masing selaku penelaah RKA-K/L dan pengesah DIPA.

Perencanaan RKA-K/L Batan dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu: penyusunan RKA-K/L, penelaahan RKA-K/L, dan penyelesaian DIPA. Penyusunan RKA-K/L Batan adalah proses pertama dari penganggaran Batan. RKA-K/L Batan disusun pada level Satuan Kerja. Terdapat sebanyak 22 Satuan Kerja dalam unit organisasi Batan. Masing-masing Satuan Kerja mengajukan usulan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian misi dan visi Satuan Kerja. Tiap Satuan Kerja memiliki kekhususan dalam program, sasaran kegiatan atau perpaduan keduanya. RKA-K/L Batan disusun oleh masing-masing Satuan Kerja dengan memperhatikan jenis-jenis klasifikasi, instrumen pengalokasian anggaran dan komponen pendekatan penganggaran.

Tahapan ke-dua dalam proses perencanaan RKA-K/L Batan yaitu Penelaahan RKA-K/L. Penelaahan RKA-K/L Batan adalah kegiatan meneliti kesesuaian antara dokumen RKA-K/L hasil pembahasan Batan dan DPR komisi mitra kerja terkait dengan pagu yang diberikan, standar biaya, klasifikasi anggaran dan instrumen penganggaran. Penelaahan RKA-K/L Batan dilakukan setelah

seluruh Satuan Kerja menyampaikan rancangan RKA-K/L kepada Departemen Keuangan melalui Biro Perencanaan. Penelaahan dilakukan antara Satuan Kerja dengan Biro Perencanaan serta antara Biro Perencanaan dengan Departemen Keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Anggaran. Hal-hal yang difokuskan pada proses penelaahan, adalah<sup>2</sup>:

- (a) Meneliti kesesuaian pemilihan Program dan Kegiatan, beserta sasaran dan indikator outputnya;
- (b) Meneliti kesesuaian alokasi pagu per Satker, per program berdasar sumber pembiayaan dan jenis mengikat atau tidak mengikat;
- (c) Meneliti kesesuaian antara biaya dengan jenis belanja (MAK) dan besaran standar biayanya;
- (d) Menilai ketersediaan data pendukung berupa TOR, RAB, HPS, data Satuan Kerja dan data pendukung lain.

Tahapan ke-tiga dalam perencanaan penganggaran adalah pengesahan DIPA. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. RKA-K/L yang telah ditelaah oleh Dirjen Anggaran Dep-Keu selanjutnya disahkan menjadi dokumen Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK). SAPSK ini-lah yang akhirnya menjadi konsep dokumen DIPA.

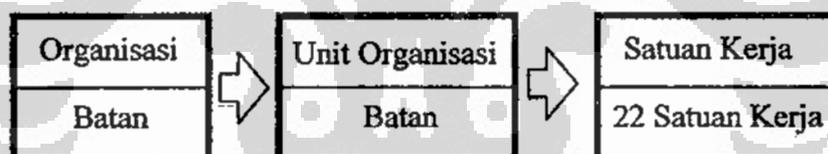
### 3.2.1. Klasifikasi Anggaran Batan

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 11 ayat 5 dan pasal 15 ayat 5 yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyusunan anggaran dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut *organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja*. Dengan demikian, penyusunan RKA-K/L Batan merinci belanja menurut unit organisasi, fungsi,

<sup>2</sup> Sumber dari Lampiran I PMK No. 80/PMK.05/2007 Bab IV tentang Tata Cara Penelaahan RKA-K/L

program, kegiatan dan jenis belanja sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan tersebut.

Anggaran belanja Batan diklasifikasikan menurut organisasi kementerian negara/lembaga sebagai pemegang bagian anggaran/pengguna anggaran/pengguna barang. Pengertian organisasi adalah kementerian negara/lembaga yang melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku (PMK No. 80, 2007). Selanjutnya masing-masing bagian anggaran dirinci ke dalam beberapa unit organisasi sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Unit organisasi adalah bagian dari suatu kementerian negara/lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program (PMK No. 80, 2007). Anggaran dari masing-masing unit organisasi dirinci lebih lanjut ke dalam anggaran Satuan Kerja. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang diberi wewenang atas penerimaan dan pengeluaran anggaran dan pengelolaan barang<sup>3</sup>. Tiap Satuan Kerja mempunyai kode satuan kerja.



Gambar 3.2. Struktur Penganggaran Batan berdasarkan Klasifikasi Organisasi  
sumber: RKA-K/L Batan Tahun 2008; telah diolah kembali

Klasifikasi fungsi menunjukkan rincian anggaran menurut fungsi/subfungsi, program, kegiatan/subkegiatan. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional (PMK No. 80, 2007). Sub fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Penggunaan fungsi dan subfungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian negara/lembaga

Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan

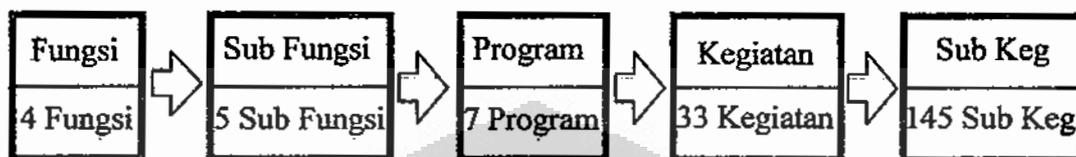
<sup>3</sup> Definisi ini diambil dari prosedur penyusunan dan penelaahan RKA-K/L serta Penyelesaian DIPA Batan, Nomor Dokumen: PR.03/OT.01.02/REN.2.

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian negara/lembaga yang bersangkutan (PMK No. 80, 2007). Sasaran program menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya, guna mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Program diuraikan dan dijabarkan melalui kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi program yang bersangkutan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa (PMK No. 80, 2007). Kegiatan harus dengan jelas menunjukkan keterkaitannya dengan program yang memayungi, memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program yang bersangkutan. Keluaran kegiatan dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Ukuran kuantitatif dan kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan (PMK No. 80, 2007). Setiap indikator kinerja didefinisikan secara jelas untuk setiap pernyataannya. Syarat indikator kinerja yang baik adalah jelas (*specific*), terukur (*measurable*), perwujudan dari data/informasi yang memang diperlukan (*attributable*), sesuai dengan ruang lingkup kegiatan (*relevant*) dan jangka waktu tertentu (*timely*).

Subkegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian keluaran/output dan tujuan kegiatan tersebut (PMK No. 80, 2007). Kegiatan dapat dirinci ke dalam dua atau lebih sub kegiatan karena kegiatan tersebut memiliki dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda satu sama lain. Subkegiatan yang satu dapat dipisahkan dengan subkegiatan lainnya berdasarkan perbedaan keluaran. Subkegiatan dapat berupa (i) tahapan/langkah

(menghasilkan *output* antara) untuk mencapai keluaran kegiatan (*output* akhir) atau (ii) aktivitas yang menghasilkan *output-output* antara dan sejenis (serumpun) serta dapat dijumlahkan menjadi *output* akhir, (iii) aktivitas yang menghasilkan *output-output* antara, tidak merupakan tahapan kegiatan, tidak sejenis dan tidak dapat dijumlahkan, tetapi secara bersama menghasilkan suatu *output* akhir.



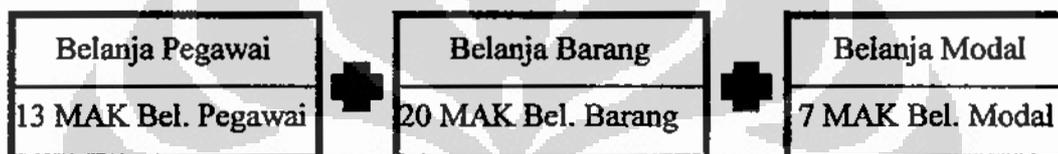
Gambar 3.3. Struktur Penganggaran Batan berdasarkan Klasifikasi Fungsi

Sumber: RKA-K/L Batan Tahun 2008; telah diolah kembali

Klasifikasi ekonomi mengelompokkan penganggaran Batan ke dalam 3 dari 8 kategori jenis belanja, yaitu: *Belanja Pegawai*, adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal (PMK No. 80, 2007). *Belanja Barang*, adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan (PMK No. 80, 2007). Belanja ini antara lain digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan yang sudah ditetapkan indeksnya dalam Standar Biaya Umum (SBU) dan belanja perjalanan. *Belanja Modal*, adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset/inventaris kementerian negara/lembaga dengan kewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan (PMK No. 80, 2007).

Jenis belanja lainnya yang tidak digunakan dalam penganggaran Batan, yaitu: *Bunga*, adalah pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok hutang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. *Subsidi*, adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada

perusahaan negara dan perusahaan swasta. *Bantuan Sosial*, adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. *Hibah*, adalah transfer rutin/modal yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional. Belanja ini antara lain digunakan untuk hibah kepada pemerintah luar negeri dan organisasi internasional. *Belanja lain-lain*, adalah pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis belanja seperti tersebut di atas (PMK No. 80, 2007).



Gambar 3.4. Struktur Penganggaran Batan berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

Sumber: RKA-K/L Batan Tahun 2008; telah diolah kembali

### 3.2.2. Instrumen Pengalokasian Anggaran

Instrumen pengalokasian anggaran merupakan petunjuk, kaidah, dan/atau ketentuan yang harus diperhatikan dalam menyusun RKA-K/L. Instrumen-instrumen dalam menyusun RKA-K/L Batan, yaitu:

- (1). Visi dan misi Batan, menjadi ruh dalam setiap proses penyusunan RKA-K/L di semua Satuan Kerja. Visi dan misi Batan tidak secara eksplisit tertuang dalam dokumen RKA-K/L disebabkan penyusunan RKA-K/L berada pada level Satuan Kerja. Sehingga RKA-K/L memuat uraian visi dan misi masing-masing Satuan Kerja;
- (2). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana kerja Batan (Renja Batan) yang telah disepakati DPR sebagai pedoman menyusun program dan kegiatan prioritas;
- (3). Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya (Umum dan Khusus) sebagai dasar perhitungan biaya masukan/*input* dan biaya keluaran/*output*;

- (4). Alokasi Pagu (Sementara dan/atau Definitif) menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan ekonomi sebagai batasan nilai anggaran yang diperkenankan;
- (5). Data pendukung, yaitu (i) Kerangka acuan (TOR) yang merupakan dokumen berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk diberikan alokasi anggaran; (ii) Rincian Anggaran Biaya, yaitu dokumen yang berisi rincian komponen-komponen masukan/*input* dari kegiatan beserta besaran dana masing-masing komponen; (iii) Data pendukung lainnya berupa daftar realisasi pembayaran gaji PNS Batan bulan tertentu, daftar inventaris kantor dan dokumen lain yang dibutuhkan.
- (6). Pedoman penyusunan RKA-K/L Batan yang memprioritaskan: (i) Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dan/atau prioritas Batan, (ii) Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat, dan (iii) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (*multi years*).

### 3.3. *Input* data RKA-K/L Batan Tahun 2008

*Input* data RKA-K/L Batan tahun 2008 menggunakan program aplikasi RKA-K/L versi 4, yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran – Departemen Keuangan.

Ada 6 komponen yang harus diisi/di-*input* ke dalam aplikasi RKA-K/L, yaitu: Satker, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, MAK/AKUN, dan Detil. Masing-masing komponen memiliki bagian yang harus di-*input* kembali:

Tabel 3.3. Komponen RKA-K/L dan rincian *input*-nya

Komponen RKA-K/L	Rincian <i>Input</i>
1. Satker	Visi, Misi, Tujuan, Nama KPA, Jabatan KPA, Bendahara, Pembuat SPM, Alamat Satker
2. Program	Sasaran Program
3. Kegiatan	Indikator Keluaran, Volume Keluaran ( <i>output</i> ) dari tahun 2006 – 2010, Satuan Keluaran, Kewenangan Pelaksana, Propinsi
4. Sub Kegiatan	Indikator Keluaran, Volume Keluaran dari tahun 2006 – 2010, Satuan Keluaran, Group MAK/tanpa Group MAK

Komponen RKA-K/L	Rincian <i>Input</i>
5. MAK/AKUN	KPPN, Kabupaten/Kota, Jenis Beban (RM, PHLN, Local Cost, PNBP, APBD, PBLU)
6. Detil	Uraian belanja, Volume, Satuan, Harga per satuan

Sumber: RKA-KL Batan 2008; telah diolah kembali

Hasil cetak dokumen RKA-KL terdiri dari form belanja dan form pendapatan. Form belanja berisi daftar rincian biaya suatu program dan kegiatan hingga level jenis belanja dan uraian/detail item tiap jenis belanja yang disertai keluran yang ingin dicapai tiap kegiatan. Form pendapatan berisi daftar rincian pendapatan per kegiatan dan per jenis/akun pendapatan yang diterima oleh suatu Satuan Kerja atas pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan form-form yang terdapat dalam dokumen RKA-KL beserta jenis datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Jenis-jenis Form hasil cetak dokumen RKA-K/L tahun 2008

Anggaran Satuan Kerja <i>Form 1.1 – 1.5</i>	Anggaran Unit Organisasi <i>Form 2.1 – 2.4</i>	Anggaran Departemen <i>Form 3.1 – 3.4</i>
1.1 Rincian kegiatan /sub kegiatan dan penjelasan indikator kegiatan /output, beserta target besaran sasaran keluaran yang ingin dicapai;	2.1 Uraian kegiatan dan penjelasan output sub kegiatan, beserta target besaran sasaran keluaran yang ingin dicapai;	3.1 Ringkasan kegiatan dan penjelasan output sub kegiatan, beserta target besaran sasaran keluaran yang ingin dicapai;
1.2 Rincian anggaran belanja per kegiatan beserta prakiraan maju 2 tahun ke depan;	2.2 Uraian anggaran belanja per kegiatan beserta prakiraan maju 2 tahun ke depan;	3.2 Ringkasan anggaran belanja per program per kegiatan beserta prakiraan maju 2 tahun ke depan;
1.3 Rincian anggaran belanja per kegiatan dan jenis belanja;	2.3 Uraian anggaran belanja per kegiatan dan jenis belanja;	3.3 Ringkasan anggaran belanja per program per kegiatan dan jenis belanja;
1.4 Rincian anggaran pendapatan (PNBP/ Pajak) beserta prakiraan maju 2 tahun ke depan;	2.4 Uraian anggaran pendapatan (PNBP/Pajak) beserta prakiraan maju 2 tahun ke depan.	3.4 Ringkasan anggaran pendapatan (PNBP/ Pajak) beserta prakiraan maju 2 tahun ke depan.
1.5 Rincian anggaran perhitungan biaya per kegiatan, subkegiatan, & akun belanja, beserta rincian uraian/ detil item belanja.		

Sumber: RKA-KL Batan 2008; telah diolah kembali

## BAB 4

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENERAPAN TIGA KOMPONEN PADA PENYUSUNAN RKA-K/L

Hasil pengambilan data yang bersumber pada dokumen RKA-K/L Batan tahun 2008 didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Komponen RKA-K/L Batan tahun 2008

Komponen RKA-K/L	Rincian & Jumlah
1. Satuan Kerja	- 22 Satuan Kerja - 22 KPA, 24 PPK, 22 Bendahara, 22 Pembuat SPM
2. Program	- 10 Program - 10 Sasaran Program
3. Kegiatan	- 33 kegiatan - 120 Indikator Keluaran ( <i>output</i> ) kegiatan - 5 x 120 Volume Keluaran dari tahun 2006 s/d 2010 - 2 x 120 data perkiraan maju 2009 - 2010 - 6 nama Satuan Keluaran - 1 Kewenangan Pelaksana - 3 Propinsi Lokasi Batan
4. MAK/AKLJN	- 40 BAS, 5 KPPN, 4 Kabupaten/Kota, 2 Jenis Beban (RM & PNBP) - 3897 Uraian belanja

Sumber: RKA-KL Batan tahun 2008; telah diolah kembali

#### 4.1. Analisis Satuan Kerja Batan

Batan memiliki 22 Satuan Kerja. Satuan Kerja di Batan adalah pusat-pusat teknis Batan, kecuali 2 Satuan Kerja, yaitu: Satuan Kerja Kantor Pusat dan Satuan Kerja Perwakilan Batan Luar Negeri. Satuan Kerja Kantor Pusat Batan merupakan gabungan dari 4 biro dan 6 ketatausahaan pimpinan Batan (kepala Batan, Sekretariat Utama, dan 4 Kedeputian). Sedangkan Satuan Kerja Perwakilan Batan Luar Negeri merupakan unit pelaksana teknis yang bersifat

husus, sehingga pengelolaan kegiatannya –meskipun kecil- membutuhkan pengaturan tersendiri.

Penyusunan RKA-K/L Batan dilakukan pada level Satuan Kerja yang mengelola kegiatan-kegiatan. Pengelolaan kegiatan pada Satuan Kerja Batan dikendalikan oleh seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPA memiliki otoritas penuh terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan di Satuan Kerjanya. Dalam kapasitasnya tersebut, maka KPA menjadi oknum/pribadi yang bertanggung jawab terhadap proses keuangan baik pembelanjaan, penerimaan serta pelaporan yang berkaitan dengan kewajiban akuntansinya. Hal ini tercermin salah satunya dalam dokumen RKA-K/L Batan tahun 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja selaku KPA (Lampiran 1), demikian pula dokumen pelaksana anggaran (DIPA) dan dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

Seorang KPA pada Satuan Kerja di Batan, dapat dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, dan staf pengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan peraturan. Mereka disebut sebagai panitia penanggungjawab pengelola keuangan. Komposisi panitia penanggungjawab pengelola keuangan pada Satuan Kerja Batan tahun 2008 diuraikan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jumlah Pagu, PNS dan Penanggungjawab Pengelola Keuangan Batan tahun 2008

Satuan Kerja	KPA	PPK	Benh	P-SPM	Staf	PNS	Pagu (Rp. Ribuan)
1. PATIR	1	1	1	1	4	378	30.717.513
2. PPGN	1	1	1	1	4	237	19.515.796
3. Kantor Pusat	1	4	1	1	11	416	39.154.252
4. PTNBR	1	1	1	1	4	232	22.615.219
5. PTAPB	1	1	1	1	4	441	30.607.445
6. PW. LN	1	-	-	-	-	-	725.000
7. PTKMR	1	1	1	1	4	165	15.612.286
8. PKTN	1	2	1	1	6	236	43.135.546
9. PDL	1	1	1	1	4	85	8.662.351
10. PRSG	1	1	1	1	4	179	27.935.511
11. PTBN	1	1	1	1	4	218	16.888.754
12. PTBIN	1	1	1	1	4	138	10.460.305

Satuan Kerja	KPA	PPK	Benh	P-SPM	Staf	PNS	Pagu (Rp. Ribuan)
13. PRPN	1	1	1	1	4	126	9.521.267
14. PRR	1	1	1	1	4	131	15.762.460
15. PTLR	1	1	1	1	4	161	13.679.609
16. PPIN	1	1	1	1	4	66	6.466.242
17. PTRKN	1	1	1	1	4	138	12.282.981
18. STTN	1	1	1	1	4	60	6.576.155
19. PPEN	1	1	1	1	5	87	17.716.604
20. Inspektorat	1	-	1	1	5	25	2.213.691
21. PDIN	1	1	1	1	4	40	10.337.668
22. PSJMN	1	1	1	1	4	38	2.665.680
<b>JUMLAH</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>95</b>	<b>3.598</b>	<b>363.252.335</b>

Sumber: RKA-K/L Batan tahun 2008; telah diolah kembali

Keberadaan seorang KPA dalam Satuan Kerja Batan menunjukkan bahwa Satuan Kerja menjadi entitas akuntansi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan keuangan dan aset yang dimilikinya. Hal ini diperjelas dengan fakta bahwa KPA dijabat oleh kepala dari masing masing pusat teknis (setingkat eselon II). KPA yang tidak dijabat oleh kepala hanya ada di dua dari 22 Satuan Kerja di Batan, yaitu Satuan Kerja Kantor Pusat Batan dan Satuan Kerja Perwakilan Batan Luar Negeri. Hal ini terjadi karena kedua Satuan Kerja tersebut memang bukan merupakan pusat teknis sehingga tidak memiliki kepala. KPA dari kedua Satuan Kerja tersebut dipegang oleh Kepala Biro Umum, selaku biro yang mengurus masalah keuangan dan administrasi umum di Batan.

Tabel 4.2 memperlihatkan keunikan dari Satuan Kerja Perwakilan Batan Luar Negeri (PW. LN). Sebagaimana diterangkan di awal, Satuan Kerja PW LN adalah unit pelaksana khusus. Alokasi anggaran pada Satuan Kerja ini diperuntukkan dalam rangka mengkoordinasikan pengeluaran Batan yang berkenaan dalam hal perwakilannya di luar negeri, dan pengeluaran operasional staf Batan yang ditempatkan di Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Satuan Kerja PW LN tidak memiliki kegiatan dasar yang terkait dengan gaji dan honor karena Satuan Kerja ini tidak memiliki staf/karyawan/PNS yang menjadi tanggungjawabnya langsung. Staf Batan yang bertugas di IAEA adalah staf ahli yang berasal dari Satuan Kerja yang terkait dengan kerjasama teknis Batan = IAEA. KPA Satuan Kerja PW LN adalah orang yang sama dengan KPA Kantor

Pusat Batan. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja PW LN dikerjakan oleh panitia penanggungjawab pengelola keuangan Satuan Kerja Kantor Pusat Batan. Karena kekhususannya tersebut Satuan Kerja Perwakilan Batan Luar Negeri tidak disertakan dalam analisis-analisis yang berkenaan dengan kegiatan dasar.

Setiap Satuan Kerja di Batan memiliki 1 orang PPK, kecuali Satuan Kerja Kantor Pusat Batan dan Satuan Kerja PKTN. Satuan Kerja Kantor Pusat Batan memiliki 4 orang PPK. Jumlah ini sama dengan jumlah biro dalam kantor pusat Batan. Tiap PPK bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa di masing-masing biro. Hal ini memastikan bahwa tiap-tiap biro bertanggungjawab terhadap keberlangsungan kegiatannya. Satuan Kerja PKTN memiliki 2 orang PPK. Hal ini terkait dengan 2 jenis pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh PKTN yang beranggaran besar, yaitu pengadaan barang/jasa fisik (prasik) dan pengadaan barang/jasa non fisik, sehingga masing-masingnya memiliki PPK sendiri.

#### 4.2. Analisis Program Batan

Batan memiliki 10 Program yang dijalankan dalam rangka menunjang pencapaian misi dan visi Batan. Bila program Batan dalam RKA-K/L dikaitkan dengan misi Batan yang dijabarkan dalam renstra Batan, maka hasilnya seperti ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3. Kesesuaian Program RKA-K/L tahun 2008 dengan misi Batan

Nama Program dalam RKA-K/L	Sasaran Program	Misi Batan
1. Penelitian & Pengembangan Iptek	Terselenggaranya litbangyasa iptek nuklir untuk peningkatan kompetensi bidang energi dan non energi, pengelolaan limbah radioaktif serta keselamatan nuklir dan radiasi.	Terlaksananya litbangyasa iptek nuklir bidang energi dan non energi
2. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Meningkatnya kapasitas hasil litbangyasa iptek nuklir dan partisipasi industri nasional dalam mendukung pembangunan PLTN.	
3. Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup	Terpantaunya radioaktivitas lingkungan dan diperolehnya data rona lingkungan.	

Nama Program dalam RKA-K/L	Sasaran Program	Misi Batan
4. Difusi & Pemanfaatan Iptek	Diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir melalui publikasi dan promosi serta pemanfaatannya oleh masyarakat.	Terlaksananya diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir
5. Pendidikan Kedinasan	Terselenggaranya pendidikan tinggi teknologi nuklir	
6. Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	Terselenggaranya tugas pokok dan fungsi kelembagaan iptek nuklir.	Terlaksananya kegiatan demi kepuasan pemangku kepentingan
7. Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Negara	Meningkatnya fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja litbangyasa iptek nuklir.	
8. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Meningkatnya kualitas & profesionalisme sumber daya manusia untuk melaksanakan litbangyasa iptek nuklir.	
9. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Negara	Bertambahnya fungsi sarana dan prasarana pendukung litbangyasa iptek nuklir.	
10. Penguatan Kelembagaan Iptek	Meningkatnya Kinerja Manajemen Kelembagaan Iptek Nuklir, Standarisasi, Akreditasi dan Optimalisasi Reaktor, Instalasi dan Fasilitas Nuklir.	

sumber: data RKA-K/L Batan 2008 dan Renstra Batan 2004 – 2009; telah diolah kembali

Program Penelitian & Pengembangan Iptek, Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup diletakkan sebagai pendukung misi terlaksananya litbangyasa iptek nuklir bidang energi dan non energi. Hal ini dikarenakan sasaran ketiga program tersebut berkesesuaian dengan nama-nama sub program dan kegiatan yang terdapat pada misi melaksanakan litbangyasa iptek nuklir bidang energi dan non energi sebagaimana disebutkan dalam Pokok-Pokok Pikir Revisi Renstra Batan 2004 – 2009.

Program Difusi & Pemanfaatan Iptek dan Pendidikan Kedinasan diletakkan sebagai pendukung misi terlaksananya diseminasi hasil litbangyasa

iptek nuklir. Hal ini terkait dengan sasaran kedua program tersebut yang berkesesuaian dengan kegiatan renstra Batan pada misi melakukan diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir, yaitu: sosialisasi dan promosi hasil litbang iptek nuklir, difusi informasi dan promosi iptek nuklir, dan pelayanan pendidikan dan elatihan teknologi nuklir.

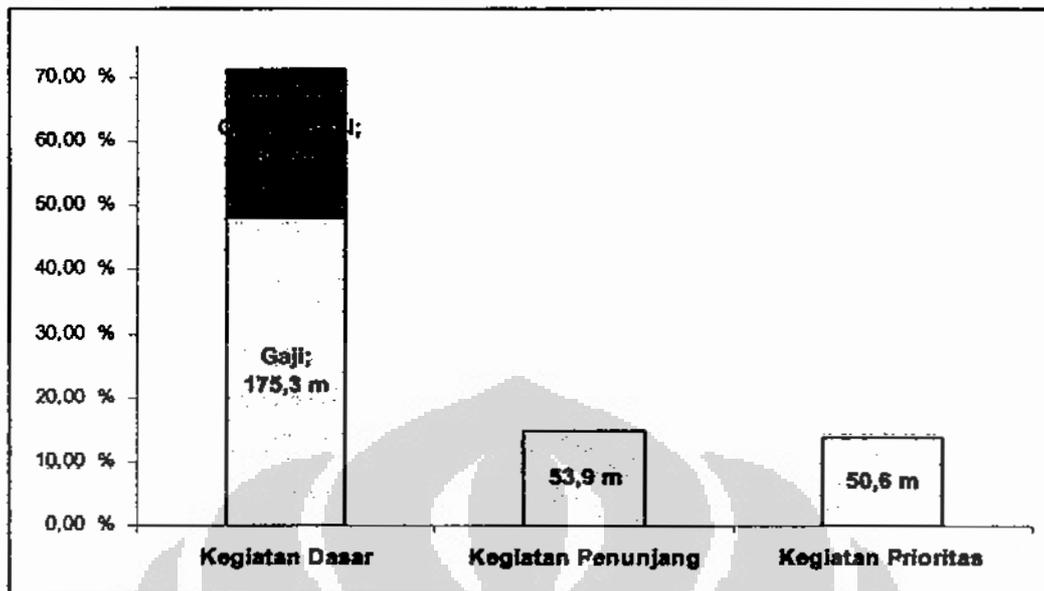
Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Negara, Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Negara, dan Penguatan Kelembagaan Iptek diletakkan sebagai pendukung misi terlaksananya kegiatan demi kepuasan pemangku kepentingan. Hal ini terkait dengan sasaran program-program tersebut yang berkesesuaian dengan kegiatan renstra Batan pada misi melaksanakan kegiatan demi kepuasan pemangku kepentingan, yang secara sub program renstra merupakan bagian dari Manajemen Operasional Kelembagaan dan Jaminan Mutu.

Hasil di atas memperlihatkan adanya hubungan antara sasaran program-program Batan dengan misi Batan. Masing-masing program memiliki keterkaitan yang jelas dengan misi Batan. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan program Batan dalam dokumen RKA-K/L disusun dengan sasaran program yang mendukung pencapaian renstra batan.

#### 4.3. Analisis Kegiatan Batan

Berdasarkan dokumen RKA-K/L Batan tahun 2008, maka didapatkan bahwa kegiatan Batan tahun 2008 berjumlah 33 kegiatan. Kegiatan ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok kategori kegiatan. Pertama, kegiatan dasar yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar Satuan Kerja, antara lain kegiatan yang mencerminkan tugas-tugas kesekretariatan. Ke-dua, kegiatan prioritas Batan, yaitu kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas Batan; ke-tiga, kegiatan penunjang yaitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satuan Kerja dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, menunjang kegiatan prioritas, dan bukan merupakan kegiatan dasar (lampiran 2).

Komposisi anggaran untuk ketiga jenis kegiatan diperlihatkan dalam Gambar 4.2.



Gambar 4.1. Komposisi anggaran Batan berdasarkan jenis kegiatan

Sumber: RKA-K/L Batan tahun 2008; telah diolah kembali

Dari gambar 4.2 terlihat bahwa proporsi anggaran Batan tahun 2008 didominasi untuk pengelolaan kegiatan dasar (71,3 %) dengan rincin 48,3 % untuk pembayaran gaji dan 23,0 % untuk operasional perkantoran. Sedangkan proporsi pengelolaan kegiatan penunjang dan kegiatan prioritas masing-masing sebesar 14,8 % dan 13,9 %. Pada satu sisi, data ini memperlihatkan kecilnya efisiensi kegiatan (kegiatan penunjang dan prioritas per kegiatan dasar = 40,2 %) namun di sisi keterpaduan pengelola kegiatan, data ini menunjukkan adanya kecukupan dukungan dari pengelolaan kegiatan dasar yang ditujukan bagi keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan-kegiatan prioritas dan penunjang. Dalam arti, pengelolaan anggaran kegiatan prioritas benar-benar dapat difokuskan untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang diinginkan, tidak lagi digunakan sebagiannya untuk pengelolaan operasional perkantoran.

Dalam hal pengelolaan jenis kegiatan, maka kegiatan dasar dikelola oleh seluruh Satuan Kerja di Batan. Sementara untuk kategori kegiatan penunjang dan prioritas disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Batan. Sebuah Satuan Kerja di Batan umumnya mengelola lebih dari satu kegiatan. Sedangkan satu nama kegiatan dapat dikelola oleh beberapa Satuan

Kerja, atau dikatakan satu kegiatan dapat dilakukan oleh beberapa Satuan Kerja, yang membedakan adalah indikator dan atau volume keluarannya.

Setiap *data base* kegiatan dalam aplikasi RKA-K/L tahun 2008 memiliki kode dan nama tersendiri. Setiap Satuan Kerja Batan memiliki variasi dalam pengelolaan memilih nama kegiatan untuk dicantumkan dalam dokumen RKA-K/L. Ada 3 kondisi yang ditemui pada RKA-K/L Batan 2008 mengenai pemilihan nama kegiatan. Pertama, nama kegiatan sudah ditetapkan berada pada program tertentu, misalnya kegiatan *Pengelolaan Gaji, Honorarium Dan Tunjangan dan Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran* hanya dapat dimasukkan pada Program Pemerintahan Yang Baik. Kedua, nama kegiatan merupakan hasil atau bagian dari kebijakan baik bersifat nasional ataupun organisasi yang disiapkan untuk satu Satuan Kerja tertentu maupun untuk keseluruhan Satuan Kerja, misal: kegiatan *Administrasi Kegiatan* disediakan untuk menampung honor tim KPA dan belanja operasionalnya. Ketiga, nama kegiatan dipilih karena kebutuhan kesesuaian dengan keluaran (*out put*) yang hendak dicapai, misal: *Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan* dipilih oleh Satuan Kerja yang memiliki kegiatan dengan *out put* pembelian sejumlah buku-buku.

Kondisi di atas menyebabkan terjadinya deferensiasi nama-nama kegiatan yang masuk dalam masing-masing kategori. Untuk kegiatan dasar, seluruh dokumen RKA-K/L Satuan Kerja Batan tahun 2008 menggunakan 2 nama kegiatan, yaitu: *Pengelolaan Gaji, Honorarium Dan Tunjangan* sebagai kegiatan pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan, dan *Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran* dipilih sebagai rumah bagi kegiatan operasional perkantoran. Sementara untuk kegiatan prioritas tersebar dalam 15 nama kegiatan, sedangkan kegiatan penunjang tersebar ke dalam 16 nama kegiatan.

#### 4.3.1. Keterpaduan Antara Kegiatan dengan Program Batan

Sebagaimana didefinisikan dalam PMK No. 80 tahun 2007, bahwa program merupakan penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan misinya. Hal ini menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan Batan dan keluarannya, pada hakekatnya harus merupakan penjabaran dari program Batan yang dilaksanakan guna mencapai visi dan misi Batan.

Satu program Batan, sekurang-kurangnya memiliki satu kegiatan, dan tiap-tiap kegiatan Batan yang berada dalam naungan suatu program harus memiliki keluaran yang mendukung pencapaian program. Data pada lampiran 3 memperlihatkan keluaran dari kegiatan disandingkan dengan sasaran dari program Batan tahun 2008.

Data dari dokumen RKA-K/L tahun 2008, Batan memiliki 10 program yang dijabarkan ke dalam 33 kegiatan Batan. Keterkaitan antara kegiatan dengan program Batan diuraikan sebagai berikut:

- Program pertama adalah Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, dengan sasaran yaitu: terselenggaranya tugas pokok dan fungsi kelembagaan iptek nuklir. Program ini merupakan rumah bagi semua Satuan Kerja yang memiliki kegiatan-kegiatan dasar yang menunjang pelaksanaan operasional perkantoran di Batan. Sasaran program ini mengharuskan kegiatan yang berada di bawahnya benar-benar memiliki output yang mendukung terselenggaranya Tupoksi dan fungsi kelembagaan iptek nuklir Batan. Dalam dokumen RKA-K/L, program ini didukung oleh 3 kegiatan, yaitu: Pengelolaan Gaji, Honorarium & Tunjangan, Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran, dan Pengelolaan & Pengendalian Anggaran. Kegiatan Pengelolaan Gaji, Honorarium & Tunjangan dan Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran merupakan kegiatan dasar, artinya output kegiatan tersebut benar-benar mendukung terselenggaranya Tupoksi Batan. Sementara kegiatan Pengelolaan & Pengendalian Anggaran merupakan kegiatan dalam rangka mengelola dan mengendalikan seluruh proses pelaksanaan anggaran melalui tim pengelola anggaran. Artinya, ketiga kegiatan tersebut telah sesuai berada dalam program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik dan memiliki output yang mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Batan. Ketiga kegiatan tersebut juga tidak saling tumpang tindih. *Output* kegiatan Pengelolaan Gaji, Honorarium & Tunjangan terkait dengan gaji PNS se-Batan. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran memiliki output yang terkait dengan operasional perkantoran, dan kegiatan Pengelolaan & Pengendalian Anggaran memiliki output yang terkait dengan Tim Pengelola

Anggaran dan operasional pelaksanaan anggaran. Ketiga output ini sangat sesuai berada pada masing-masing kegiatannya.

- Program ke-dua, Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Negara, mempunyai sasaran yaitu: meningkatnya fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja litbangyasa iptek nuklir. Program ini merupakan rumah bagi Satuan Kerja Inspektorat dan Bagian Evaluasi Program. Sasaran program ini mengharuskan kegiatan dibawahnya memiliki output seputar pengawasan dan monev. Dalam dokumen RKA-K/L, program ini didukung oleh 2 kegiatan yaitu: Pembinaan/Koordinasi/ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi & Pelaporan dan Penyelenggaraan Pengawasan & Pemeriksaan Aparatur Negara (Internal). Kegiatan Pembinaan/Koordinasi/ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi & Pelaporan memiliki output Paket Laporan Monitoring Dan Evaluasi Dan Pelaporan Hasil Program Litbangyasa, Diseminasi, Dan Manajemen Kelembagaan, sedangkan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan & Pemeriksaan Aparatur Negara (Internal) memiliki output Jumlah Paket Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan. Artinya; kedua kegiatan tepat berada dalam program ini dan output kegiatanpun mendukung pencapaian sasaran program.
- Program ke-tiga, Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, memiliki sasaran yaitu: meningkatnya kualitas & profesionalisme sumber daya manusia untuk melaksanakan litbangyasa iptek nuklir. Program ini merupakan rumah bagi Satuan Kerja Pusdiklat dan Biro Sumber Daya Manusia. Program ini didukung oleh kegiatan Pengembangan SDM & Administrasi Kepegawaian dan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Aparatur Negara. Output kegiatan Pengembangan SDM & Administrasi Kepegawaian yaitu: Terwujudnya Pembinaan SDM Yang Profesional Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Yang Baik dan output kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Aparatur Negara yaitu: Jumlah Penyelenggaraan Diklat Teknis Di Bidang Ketenaganukliran. Nama kedua kegiatan tepat berada dalam program ini serta output dari kedua kegiatan tersebut mendukung pencapaian sasaran program.

- Program ke-empat, Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Negara, dengan sasaran yaitu: bertambahnya fungsi sarana dan prasarana pendukung litbangyasa iptek nuklir. Program ini merupakan rumah bagi Biro Umum dan Satuan Kerja yang memiliki perencanaan untuk membangun ataupun merefungsionalisasi sarana dan prasarana di Batan. Program ini dalam dokumen RKA-K/L didukung oleh 3 kegiatan, yaitu: Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana & Prasarana, Rehabilitasi/ Peningkatan / Renovasi Gedung / Lab / Perpustakaan, dan Perawatan Prasarana & Jaringan. Masing-masing output dari kegiatan tersebut adalah: Terselenggaranya Pembangunan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana, Paket Gedung / Laboratorium / Perpustakaan Yang Direhabilitasi Dan Direnovasi, dan Jumlah Paket Prasarana Dan Jaringan Yang Terawat. Ketiga kegiatan tepat berada dalam program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Negara, selain karena nama kegiatan sesuai dengan nama program, juga output kegiatan mendukung pencapaian sasaran program tersebut.
- Program ke-lima, Penelitian & Pengembangan Iptek, sasarannya yaitu: terselenggaranya litbangyasa iptek nuklir untuk peningkatan kompetensi bidang energi dan non energi, pengelolaan limbah radioaktif serta keselamatan nuklir dan radiasi. Program ini merupakan rumah bagi seluruh Satuan Kerja yang melakukan penelitian, pengembangan, perekayasaan (litbangyasa) di bidang nuklir. Dalam dokumen RKA-K/L, program ini didukung oleh 11 kegiatan, yaitu: Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir, Pengembangan Teknologi Perekayasaan Perangkat Nuklir, Pengembangan Teknologi Proses Radioisotop & Radiofarmaka, Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop & Radiasi, Pengembangan Teknologi Reaktor & Energi Nuklir, Pengembangan Teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif, Pengembangan Teknologi Akselerator & Proses Bahan, Pengembangan Teknologi Bahan Galian Nuklir, Pengembangan Teknologi Bahan Industri Nuklir, Pengembangan Teknologi Keselamatan, Metrologi Radiasi & Biomedika Nuklir, Pengembangan Teknologi Nuklir Bahan & Radiometri. Kesemua kegiatan tersebut memiliki output di bidang

penelitian, sehingga mendukung sasaran program Penelitian & Pengembangan Iptek.

- Program ke-enam, Difusi & Pemanfaatan Iptek, sasarannya yaitu: diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir melalui publikasi dan promosi serta pemanfaatannya oleh masyarakat. Program ini merupakan rumah bagi kegiatan-kegiatan promosi dan diseminasi iptek nuklir serta kegiatan-kegiatan yang bersifat layanan bagi masyarakat (PNBP). Program ini dalam dokumen RKA-K/L didukung oleh 2 kegiatan, yaitu: Layanan Pemanfaatan Iptek Bagi Masyarakat, dan Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir. Masing-masing output kegiatan yaitu: Terlaksananya Layanan Pemanfaatan Iptek Bagi Masyarakat, dan Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi Dan Promosi Hasil Litbang Iptek Nuklir. Kedua kegiatan tepat berada dalam program Difusi & Pemanfaatan Iptek, selain karena nama kegiatan sesuai dengan nama program, juga output kegiatan mendukung pencapaian sasaran program.
- Program ke-tujuh, Penguatan Kelembagaan Iptek, dengan sasaran yaitu: meningkatnya kinerja manajemen kelembagaan iptek nuklir, standarisasi, akreditasi dan optimalisasi reaktor, instalasi dan fasilitas nuklir. Program ini merupakan rumah bagi kegiatan-kegiatan penunjang, khususnya berkaitan dengan optimalisasi dan manajemen kelembagaan seperti pada Satuan Kerja PSJMN, Biro-biro, dan Satuan Kerja yang memiliki fungsi optimalisasi sarana dan prasarana. Dalam dokumen RKA-K/L, program ini didukung oleh 6 kegiatan, yaitu: Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja & Anggaran, Peningkatan Jaringan Kelembagaan Iptek, Revitalisasi & Pendayagunaan Reaktor, Instalasi & Fasilitas Nuklir, Pelaksanaan Standardisasi Iptek Nuklir, Pembinaan & Pengelolaan Keuangan, Sarana & Prasarana, Pengembangan Sistem Informasi Ketenaganukliran.  
Peningkatan kinerja manajemen kelembagaan iptek nuklir dimandati oleh 4 kegiatan yaitu: Pembinaan/Penyusunan Program Rencana Kerja & Anggaran, Peningkatan Jaringan Kelembagaan Iptek, Pembinaan & Pengelolaan Keuangan, dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenaganukliran. Masing-masing output yaitu: dokumen perencanaan

program & anggaran serta pelaksanaan program & kegiatan iptek nuklir, jumlah dokumen (naskah) perjanjian kerja sama yang ditandatangani, terbinanya & terkelolanya keuangan, sarana & prasarana, dan jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi ketenaganukliran. Sasaran standarisasi dan akreditasi pada program ini dipunggawai oleh kegiatan Pelaksanaan Standardisasi Iptek Nuklir, dengan output: 3 paket dokumen (standardisasi iptek nuklir, akreditasi & sertifikasi iptek nuklir, dan jaminan mutu nuklir). Sasaran optimalisasi reaktor, instalasi dan fasilitas nuklir dikomandani oleh kegiatan Revitalisasi & Pendayagunaan Reaktor, Instalasi & Fasilitas Nuklir yang memiliki output: jumlah kegiatan revitalisasi & pendayagunaan reaktor, instalasi & fasilitas nuklir.

- Program ke-delapan, Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, memiliki sasaran yaitu: meningkatnya kapasitas hasil litbangyasa iptek nuklir dan partisipasi industri nasional dalam mendukung pembangunan PLTN. Program ini merupakan rumah bagi kegiatan-kegiatan prioritas yang terkait dengan pembangunan PLTN dan pemanfaatannya. Dalam dokumen RKA-K/L, program ini didukung oleh 2 kegiatan, yaitu: Pendayagunaan Hasil Litbang Iptek Nuklir dan Penyiapan Infrastruktur Dasar Pendukung Pembangunan PLTN. Peningkatan kapasitas hasil litbangyasa iptek nuklir dimandati oleh output dari kegiatan Pendayagunaan Hasil Litbang Iptek Nuklir, yaitu: Jumlah Kegiatan Pendayagunaan Hasil Litbang Iptek Nuklir. Sedangkan partisipasi industri nasional dalam mendukung pembangunan PLTN dimandati oleh output dari kegiatan Penyiapan Infrastruktur Dasar Pendukung Pembangunan PLTN, yaitu: Jumlah Dokumen Infrastruktur Dasar Pendukung Pembangunan PLTN.
- Program ke-sembilan, Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup, memiliki sasaran yaitu: terpantaunya radioaktivitas lingkungan dan diperolehnya data rona lingkungan. Program ini merupakan rumah bagi Satuan Kerja yang memiliki reaktor ataupun Satuan Kerja yang memiliki kegiatan pengukuran radioaktivitas di lingkungan dan pengawasan dampak keberadaan aktivitas radiasi baik dari alam maupun buatan manusia. Program ini didukung oleh kegiatan Pemantauan & Evaluasi Radioaktivitas

Lingkungan yang memiliki output yaitu: 2 paket data rona radioaktivitas lingkungan, keselamatan lingkungan serta inspeksi keselamatan. Nama dan output kegiatan pada program ini sudah tepat dan mendukung keberhasilan sasaran program.

- Program ke-sepuluh, Pendidikan Kedinasan, memiliki sasaran yaitu: terselenggaranya pendidikan tinggi teknologi nuklir. Program ini khusus untuk Satuan Kerja STTN dengan kegiatannya yaitu: Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir, yang memiliki output: 1 Paket Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir.

Hasil analisis keterkaitan antara program dan kegiatan menunjukkan bahwa nama-nama kegiatan yang dipilih dalam dokumen RKA-K/L Batan tahun 2008 telah sesuai dengan nama program induknya. Output kegiatan juga telah mendukung pencapaian sasaran program, meskipun nampak belum adanya kesamaan dalam format penyusunan redaksional output kegiatan dan sasaran program. Kegiatan-kegiatan Batan tahun 2008 juga telah menerapkan keterpaduan, dimana tidak terjadi duplikasi kegiatan. Hal ini terlihat pada keluaran kegiatan yang memiliki karakteristik output yang berbeda dengan keluaran dari kegiatan lain.

#### 4.3.2. Analisis Satuan Keluaran Kegiatan

Setiap kegiatan Batan memiliki keluaran yang mendukung pencapaian sasaran program. Keluaran dari kegiatan terkuantifikasi ke dalam satuan keluaran. Satuan keluaran menjadi indikator dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan.

Satuan keluaran (satuan *output*) memiliki keterkaitan dengan keterpaduan kegiatan dalam hal keharusan kesamaan dalam penamaan suatu satuan keluaran. Hal ini menyangkut pengukuran keberhasilan kegiatan. Bila suatu kegiatan dilakukan oleh beberapa Satuan Kerja Batan dan memiliki keluaran yang sama atau serupa, maka seharusnya kegiatan tersebut juga memiliki satuan keluaran yang sama pula. Keseragaman dalam penamaan satuan keluaran akan mempermudah pengukuran tingkat keberhasilan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu Satuan Kerja.

Data dokumen RKA-KL Batan tahun 2008 terdapat 33 kegiatan yang dilaksanakan oleh 22 Satuan Kerja Batan yang menghasilkan 120 keluaran. Dari 33 kegiatan, terdapat 7 kegiatan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu Satuan Kerja. Kegiatan tersebut adalah: Pengelolaan Gaji, Honorarium & Tunjangan; Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran; Pengelolaan Dan Pengendalian Anggaran; Rehabilitasi/ Peningkatan/ Renovasi Gedung/ Laboratorium/ Perpustakaan; Layanan Pemanfaatan Iptek Bagi Masyarakat; Revitalisasi Dan Pendayagunaan Reaktor, Instalasi Dan Fasilitas Nuklir; dan Pemantauan Dan Evaluasi Radioaktivitas Lingkungan. 26 kegiatan lainnya dilaksanakan oleh satu Satuan Kerja sehingga tidak memberikan masalah dalam hal keseragaman satuan keluaran. Nama satuan keluaran beserta jumlah Satuan Kerja yang menggunakannya diperlihatkan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Nama dan satuan keluaran dari kegiatan dalam RKA-K/L Batan tahun 2008 yang digunakan oleh beberapa Satuan Kerja

No	Kode & Nama Kegiatan	Satker	Satuan Keluaran
1	0001 Pengelolaan Gaji, Honorarium Dan Tunjangan	21	ORANG (21)
2	0002 Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	22	KEGIATAN (21), PAKET (1)
3	0043 Pengelolaan Dan Pengendalian Anggaran	21	BULAN (12), ORANG (5), PAKET (4)
4	0100 Rehabilitasi/ Peningkatan/ Renovasi Gedung/ Laboratorium/ Perpustakaan	2	PAKET (2)
5	6916 Layanan Pemanfaatan Iptek Bagi Masyarakat	14	KEGIATAN (3), PAKET (10) LAPORAN (1)
6	6921 Revitalisasi Dan Pendayagunaan Reaktor, Instalasi Dan Fasilitas Nuklir	10	PAKET (10)
7	6928 Pemantauan Dan Evaluasi Radioaktivitas Lingkungan	4	PAKET (4)

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa RKA-K/L Batan tahun 2008 telah menerapkan perpaduan pada satuan keluaran kegiatan. Terdapat 106 dari 120 atau 88,3 % satuan keluaran yang terpadu, hanya 14 dari 120 atau 11,7 % keluaran yang menyelisih dari satuan keluaran yang semestinya. Satuan keluaran selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.

#### 4.3.3. Analisis Volume Keluaran Kegiatan

Dokumen RKA-K/L Batan tahun 2008 menghasilkan 120 keluaran kegiatan disertai dengan volume dan anggarannya. Perencanaan jangka menengah berupa perkiraan volume kegiatan dan anggarannya untuk tahun depan, akan memungkinkan adanya perubahan pada volume keluaran dan anggarannya. Dari sinilah muncul istilah perubahan volume keluaran dan perkiraan maju yang keduanya menjadi unsur dalam KPJM.

Komposisi dari 120 data keluaran terhadap data perkiraan maju dan volume keluaran diperlihatkan dalam tabel 4.4.

Tabel 4.5. Komposisi data KPJM menurut jenis kegiatan

Jenis Kegiatan; data keluaran	Perkiraan Maju 2009		Perubahan Volume Keluaran 2009	
	1. Kegiatan Dasar; 43 Data	- Naik	15 Data	- Bertambah
	- Turun	2 Data	- Berkurang	2 Data
2. Kegiatan Penunjang; 59 Data	- Naik	15 Data	- Bertambah	5 Data
			- Tetap	10 Data
	- Turun	5 Data	- Turun	5 Data
3. Kegiatan Prioritas; 18 Data	- Naik	6 Data	- Tetap	6 Data
	- Turun	5 Data	- Turun	5 Data

sumber: data RKA-K/L Batan tahun 2008; telah diolah kembali

Komposisi dari 120 data keluaran terhadap data perkiraan maju tahun 2009 dibandingkan anggaran tahun 2008 yaitu: 36 data (30,0 %) menunjukkan kenaikan anggaran tahun 2009 terhadap anggaran tahun 2008, 72 data (60,0 %) tidak terjadi perubahan anggaran tahun 2009 terhadap anggaran tahun 2008, dan 12 data (10,0 %) menunjukkan penurunan anggaran tahun 2009 terhadap anggaran tahun 2008. Pada 36 data yang menunjukkan kenaikan anggaran tahun 2009 terhadap anggaran tahun 2008, 20 data memiliki volume keluaran yang bertambah, 16 data lainnya memiliki volume keluaran yang tetap. Pada 72 Data yang menunjukkan tidak terjadi perubahan anggaran tahun 2009 terhadap anggaran tahun 2008, 71 data menunjukkan volume keluaran yang tetap, 1 data lainnya menunjukkan volume keluaran yang naik. Sedangkan pada 12 data yang menunjukkan penurunan anggaran tahun 2009 terhadap anggaran tahun 2008, seluruhnya mengalami penurunan volume keluaran.

Dari data di atas, yang memungkinkan masih berada dalam koridor KPJM hanya 48 data (40,0 %) yang masuk dalam kelompok perkiraan majunya mengalami kenaikan dan perkiraan majunya mengalami penurunan. Hal ini didasari pada asumsi bahwa bila tidak ada perubahan kualitas pada keluaran sebuah kegiatan (satuan input tetap), maka perkiraan maju akan mengalami kenaikan disebabkan oleh kenaikan volume keluaran pada kegiatan, kenaikan harga dasar satuan input (karena faktor inflasi, kurs, dan lainnya), atau perpaduan keduanya. Perkiraan maju dapat mengalami penurunan dari tahun 2008 disebabkan oleh karena penurunan volume keluaran. Berdasarkan asumsi ini, maka tidak mungkin perkiraan maju dari data keluaran akan bernilai tetap sama dengan tahun 2008 tanpa mengurangi volume keluaran apalagi bila volume keluaran justru meningkat.

Dari hasil di atas, maka dalam tinjauan aspek perkiraan maju dan perubahan volume keluaran, terlihat bahwa dokumen RKA-K/L Batan tahun 2008, belum sepenuhnya menerapkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. Hanya 40,0 % data keluaran yang dapat diterima meski belum dapat dinilai kualitas perkiraan maju dari sisi kelayakan penganggaran, sementara 72 dari 120 data (60,0 %) tidak sejalan dengan semangat KPJM dalam memperkirakan penganggaran untuk tahun depan. Belum ada metodologi untuk memberikan

justifikasi bahwa perkiraan maju yang dicantumkan tersebut merupakan indikasi pendanaan tahun berikutnya. Hal ini yang menyebabkan tidak tertibnya pengisian/input data perkiraan maju.

Bila analisis volume keluaran ini diintegrasikan dengan analisis satuan keluaran, maka dari data pada lampiran 4, didapatkan bahwa dari 120 data keluaran, 26 data memiliki satuan keluaran 'orang', 54 data memiliki satuan keluaran 'paket', 12 data memiliki satuan keluaran 'bulan', 24 data memiliki satuan keluaran 'kegiatan', 3 data memiliki satuan keluaran 'laporan' dan 1 data memiliki satuan keluaran 'naskah'. Komposisi 120 data KPJM dalam kategori Satuan Keluaran, seperti pada tabel 4.5.

Tabel 4.6. Komposisi data menurut satuan keluaran

Satuan Keluaran	Jumlah data keluaran	Menerapkan KPJM		Tidak Menerapkan KPJM	
		Jumlah data	%	Jumlah data	%
1. Bulan	12	0	0,00	12	100,00
2. Kegiatan	24	6	25,00	18	75,00
3. Laporan	3	2	66,67	1	33,33
4. Naskah	1	1	100,00	0	0,00
5. Orang	26	16	61,54	10	38,46
6. Paket	54	23	42,59	31	57,41
<b>Rata-rata</b>	<b>120</b>	<b>48</b>	<b>40,00</b>	<b>72</b>	<b>60,00</b>

Sumber: data RKA-K/L Batan tahun 2008; telah diolah kembali

Dari data tabel 4.4 diperoleh hasil bahwa kegiatan yang menggunakan satuan keluaran '*naskah, laporan dan orang*' memiliki prosentase menerapkan KPJM lebih banyak dibanding kegiatan yang menggunakan satuan keluaran '*bulan, kegiatan dan paket*'. Hal ini diprediksi karena satuan keluaran '*naskah, laporan dan orang*' lebih fokus dan jelas dari satuan keluaran '*bulan, kegiatan dan paket*'. Hal ini menyebabkan kegiatan yang menggunakan satuan keluaran yang lebih fokus dan jelas memiliki kemungkinan perubahan volume keluaran di tahun yang akan datang, sehingga penerapan perkiraan maju sebagai data dasar KPJM dapat terpenuhi, dibandingkan dengan kegiatan yang menggunakan satuan keluaran yang berkuantitas besar dan umum.

Hasil analisis di atas, menjadi dasar untuk melihat hubungan KPJM dengan kategori jenis kegiatan (dasar, penunjang dan prioritas). Data pada Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa terdapat 17 data dari 26 data (39,5 %) pada kegiatan dasar yang menerapkan KPJM, dengan rincian: 15 data (dari 21 data atau 68,2 %) berasal dari kegiatan *Pengelolaan Gaji, Honorarium Dan Tunjangan*, 2 data (dari 22 data atau 10,5 %) berasal dari kegiatan *Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran*. Hasil ini memperlihatkan bahwa pada jenis kegiatan dasar, maka KPJM lebih banyak diterapkan pada kegiatan *Pengelolaan Gaji, Honorarium Dan Tunjangan*.

Kenaikan perkiraan maju pada kegiatan dasar, diprediksi berasal dari kenaikan volume keluaran. Pada kegiatan *Pengelolaan Gaji, Honorarium Dan Tunjangan*, keluarannya adalah 'orang' (pegawai yang menerima gaji dan tunjangan), sehingga kenaikan volume keluaran adalah kenaikan jumlah pegawai pada Satuan Kerja. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan unit biaya yang sama (anggaran per orang) antara dana tahun 2008 dengan tahun 2009 (data lampiran 4). Sedangkan kegiatan *Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran*, memiliki keluaran 'kegiatan' (yaitu jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan tersebut), sehingga kenaikan volume keluaran adalah kenaikan jumlah sub kegiatan. Akibatnya bila diperkirakan sub kegiatan tahun 2009 masih tetap sama dengan tahun 2008, maka volume keluaran akan tetap sama tidak berubah, sehingga perkiraan maju menjadi tidak berubah. Hal ini terlihat pada 19 data volume keluaran dari 22 data KPJM (86,4 %) pada kegiatan *Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran*.

Untuk kegiatan penunjang, data tabel 4.4 memperlihatkan bahwa terdapat 59 data KPJM. Data tersebut tersebar pada 16 kegiatan Batan. Terdapat 20 data (33,9 %) yang menerapkan KPJM. Ke 20 data tersebut tersebar pada 9 kegiatan batan. Ada 7 kegiatan penunjang yang tidak menerapkan KPJM, dan ke 7 kegiatan tersebut menggunakan satuan keluaran 'paket'. Sedangkan keseluruhan satuan keluaran 'paket' yang tidak menerapkan KPJM adalah 23 dari 37 data (62,2 %). Sementara itu, 12 data yang menggunakan satuan keluaran 'bulan', tidak ada yang menerapkan KPJM. Satuan keluaran ini digunakan hanya pada satu kegiatan, yaitu *Pengelolaan Dan Pengendalian Anggaran*. Terdapat 9 Satuan Kerja yang

menggunakan satuan keluaran selain 'bulan' untuk kegiatan ini, dan 9 data tersebut menerapkan KPJM. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan satuan keluaran 'paket' dan 'bulan' pada kegiatan penunjang memiliki persentase yang rendah untuk menerapkan KPJM (0 – 37,8 %). Satuan keluaran 'laporan dan naskah' pada kegiatan penunjang memiliki prosentase yang tinggi menerapkan KPJM (100 %), sedangkan satuan keluaran 'orang dan kegiatan' berada pada posisi moderat (40,0 – 67,7 %).

Pada kegiatan prioritas, data tabel 4.4 memperlihatkan bahwa terdapat 18 data KPJM yang tersebar pada 15 kegiatan Batan. Terdapat 11 data (61,1 %) yang menerapkan KPJM, dimana data tersebut tersebar pada 10 kegiatan Batan. 5 kegiatan prioritas Batan lainnya yang tidak menerapkan KPJM, menggunakan satuan keluaran 'paket'. Hasil ini tidak jauh beda dengan hasil pada kegiatan penunjang, yaitu penggunaan satuan keluaran 'paket' pada kegiatan prioritas, memiliki persentase yang lebih kecil dibanding penggunaan satuan keluaran 'laporan dan kegiatan'.

Data mengenai satuan keluaran dan jumlahnya pada jenis kegiatan diperlihatkan pada tabel 4.6.

Tabel 4.7. Komposisi Data menurut satuan keluaran per jenis kegiatan

Jenis Kegiatan	Data KPJM	Keluaran		Menerapkan KPJM
		Satuan Keluaran	Jumlah Data	
1. Kegiatan Dasar	43	Orang	21	14
		Kegiatan	20	3
		Paket	2	0
		<b>Jumlah</b>		<b>17</b>
2. Kegiatan Penunjang	59	Bulan	12	0
		Kegiatan	3	2
		Laporan	1	1
		Naskah	1	1
		Orang	5	2
		Paket	37	14
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>		
3. Kegiatan Prioritas	18	Kegiatan	1	1
		Laporan	2	1
		Paket	15	9
		<b>Jumlah</b>		<b>11</b>
<b>Jumlah</b>	<b>120</b>		<b>120</b>	<b>48</b>

Sumber: data RKA-K/L Batan tahun 2008; telah diolah kembali

Hasil ini menunjukkan bahwa satuan keluaran memiliki pengaruh terhadap penerapan KPJM. Satuan keluaran yang fokus dan jelas, seperti: 'orang' dan 'laporan' akan memperbesar kemungkinan terjadinya perubahan volume keluaran, yang berdampak pada peningkatan perkiraan maju anggaran tahun depan dan sebaliknya, satuan keluaran yang bersifat umum akan memperkecil kemungkinan perubahan volume keluaran di tahun mendatang.

Hasil di atas juga memperlihatkan bahwa ada kecenderungan Satuan Kerja memilih satuan keluaran yang bersifat umum seperti "paket" atau "kegiatan". Hal ini karena satuan keluaran "paket" dan "kegiatan" cenderung *kebal* terhadap masalah revisi. Dengan satuan yang bersifat umum dan statis, jika terjadi perubahan dalam pelaksanaan anggaran tidak sampai mengubah volume keluaran, sehingga tidak harus mengubah DIPA Satuan Kerja yang akan memakan waktu dan tenaga.

#### 4.3.4. Analisis Kinerja Pada Kegiatan

Setiap kegiatan Batan memiliki output yang direalisasikan dalam dokumen RKA-K/L berupa indikator keluaran. Setiap kegiatan Batan juga merupakan turunan dari program Batan, yang mana tujuan dari keberadaan kegiatan tersebut adalah untuk menunjang pencapaian program yang menaunginya. Meskipun demikian, belum ditemukan argumen yang meyakinkan bahwa pencapaian tujuan program atau sasaran program merupakan dampak (outcome) dari suatu kegiatan.

Guna mewujudkan keluaran yang ingin dicapai, setiap kegiatan Batan memiliki masukan (*input*). Suatu input kegiatan dapat terlihat pada bagian terkecil dalam dokumen RKA-K/L yaitu berupa uraian jenis belanja (BAS), berupa detail atau rincian belanja. Detail belanja ini berasal dari anak sub kegiatan (Group MAK) dan ataupun sub kegiatan yang berada di bawah suatu kegiatan Batan.

Dari data dokumen RKA-K/K Batan tahun 2008, diperoleh 10 data sasaran program, 120 data output pada level kegiatan, dan 702 data output pada level sub kegiatan. Pada penelitian kali ini, analisis PBK akan difokuskan pada 7 kegiatan tertentu, yaitu: kegiatan Pemantauan & Evaluasi Radioaktivitas Lingkungan, Layanan Pemanfaatan Iptek Bagi Masyarakat, Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir, Pembinaan/ Koordinasi/ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi

& Pelaporan, Penyelenggaraan Pengawasan & Pemeriksaan Aparatur Negara (Internal), Pengembangan SDM & Administrasi Kepegawaian, Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Aparatur Negara.

Hubungan antara input, output dan outcome dari kegiatan, diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 4.8. Uraian Input, Output dan Outcome dari Kegiatan Batan tahun 2008

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Input</b>	<b>Output</b>	<b>sasaran Program</b>
1. Pemantauan & Evaluasi Radioaktivitas Lingkungan.	- Dana: Rp. 3,15 M Bel. Modal: 2,32 M Operasional: 0,83 M - SDM: tidak terdata	12 Paket Data Rona Radioaktivitas Lingkungan, Keselamatan Lingkungan, serta Inspeksi Keselamatan.	Terpantaunya radioaktivitas lingkungan dan diperolehnya data rona lingkungan.
2. Layanan Pemanfaatan Iptek Bagi Masyarakat.	- Dana: Rp. 8,28 M Bel. Modal: 0,83 M Operasional: 7,45 M - SDM: 580 orang	16 Paket Layanan Pemanfaatan Iptek Bagi Masyarakat; 5 Kegiatan Layanan Iptek Nuklir; 1 Laporan Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi.	Diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir melalui publikasi dan promosi serta pemanfaatannya oleh masyarakat.
3. Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir.	-Dana: Rp. 6,84 M Bel. Modal: 3,00 M Operasional: 3,84 M - SDM: terdata 22 orang	2 Paket Kegiatan Diseminasi Informasi Dan Promosi Hasil Litbang Iptek Nuklir.	Diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir melalui publikasi dan promosi serta pemanfaatannya oleh masyarakat.
4. Pembinaan/ Koordinasi/ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	- Dana: Rp. 289,4 jt Bel. Modal: 77,5 jt Operasional: 211,9 jt - SDM: terdata 5 orang	1 Paket Laporan Monitoring & Evaluasi Dan Pelaporan Hasil Program Litbangyasa, Diseminasi, & Manajemen Kelembagaan.	Meningkatnya fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja litbangyasa iptek nuklir.

Nama Kegiatan	Input	Output	sasaran Program
5. Penyelenggaraan Pengawasan & Pemeriksaan Aparatur Negara (Internal).	- Dana: Rp. 320,0 jt Bel. Modal: 205,0 jt Operasional: 115,0 jt - SDM: terdata 14 orang	2 Paket Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan & Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan.	Meningkatnya fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja litbang-yasa iptek nuklir.
6. Pengembangan SDM & Administrasi Kepegawaian	- Dana: Rp. 1,01 M Bel. Modal: 0,32 M Operasional: 0,69 M - SDM: 71 orang	1 Paket Pembinaan SDM Yang Profesional Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Yang Baik.	Meningkatnya kualitas & profesionalisme sumber daya manusia untuk melaksanakan litbangyasa iptek nuklir
7. Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Aparatur Negara	- Dana: Rp. 1,5 M Bel. Modal: 0,67 M Operasional: 0,83 M - SDM: 35 orang	4 Paket Penyelenggaraan Diklat Teknis Di Bidang Ketenaganukliran.	Meningkatnya kualitas & profesionalisme sumber daya manusia untuk melaksanakan litbangyasa iptek nuklir

Sumber: data RKA-K/L Batan tahun 2008; telah diolah kembali

Data tabel 4.8 memperlihatkan komposisi unsur-unsur kinerja pada kegiatan Batan tahun 2008. Dari data didapatkan bahwa dokumen RKA-K/L Batan tahun 2008 telah memberikan informasi input dana/anggaran secara jelas, namun tidak dapat memberikan informasi input SDM secara lengkap. Informasi SDM pada dokumen RKA-K/L diperoleh dari uraian honor pelaksana kegiatan. Salah satu dampak penganggaran terpadu adalah adanya pembatasan pemberian honor, menyebabkan beberapa kegiatan tidak diperbolehkan lagi menganggarkan belanja honor bagi para pelaksana kegiatannya. Hal ini menyebabkan dokumen RKA-K/L tidak dapat memberikan informasi mengenai jumlah SDM yang terlibat dalam suatu kegiatan.

Cara alternatif untuk mengetahui jumlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan adalah melalui rincian biaya operasional seperti perjalanan dinas dan koordinasi/rapat. Cara ini membutuhkan syarat bahwa uraian pada jenis belanja harus dirinci atau menunjukkan personil yang ikut serta. Meskipun masih bersifat tidak pasti, namun langkah ini perlu untuk diupayakan bila informasi

mengenai SDM dalam suatu kegiatan dapat terbaca secara eksplisit pada dokumen RKA-K/L.

Dalam hal keberadaan output kegiatan, maka dokumen RKA-K/L Batan tahun 2009 telah mencantumkan output kegiatan secara jelas. Volume output juga telah didokumentasikan sebagaimana telah digunakan dalam analisa penerapan KPJM pada dokumen RKA-K/L Batan. Keberadaan volume ini memungkinkan untuk menghasilkan suatu ukuran kualitas terhadap satu kegiatan, yaitu indeks biaya kegiatan. Sebagai contoh adalah kegiatan Pemantauan & Evaluasi Radioaktivitas Lingkungan yang memiliki anggaran total sebesar Rp. 3,15 Milyar guna menghasilkan 12 Paket Data Rona Radioaktivitas Lingkungan. Dengan asumsi bahwa tiap keluaran kegiatan memiliki kualitas yang sama, maka dapat kita katakan bahwa indeks biaya kegiatan Pemantauan & Evaluasi Radioaktivitas Lingkungan adalah sebesar Rp. 262,5 juta. Artinya, untuk menghasilkan 1 paket data rona radioaktivitas lingkungan, dibutuhkan dana sebesar Rp. 262,5 juta. Indeks biaya kegiatan ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK).

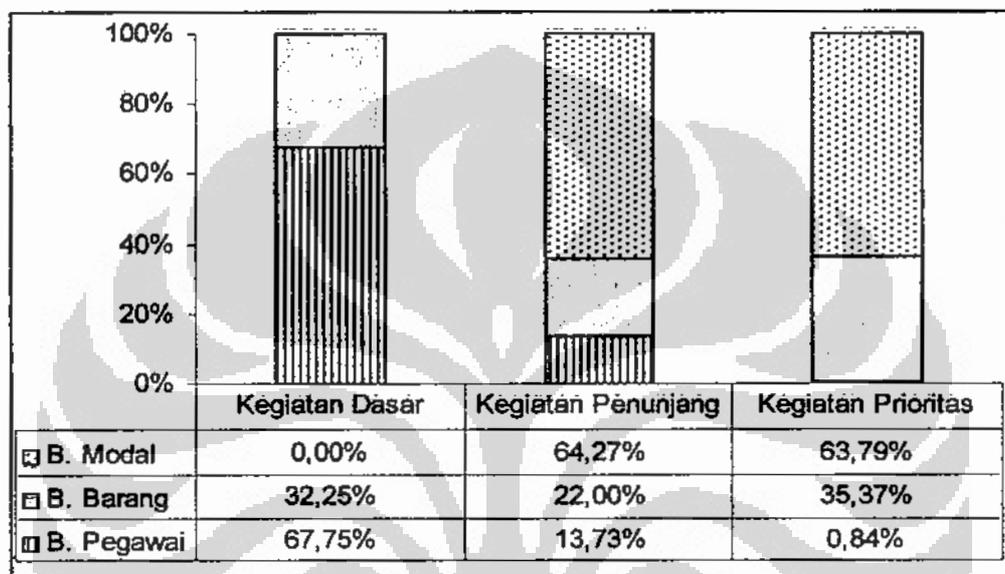
Data tabel 4.8 juga memperlihatkan konsistensi antara output kegiatan dengan sasaran program yang diharapkan. Masing-masing output bersesuaian dan mendukung pencapaian sasaran program. Meskipun demikian, sekali lagi belum ada argumentasi yang jelas bahwa sasaran program tersebut merupakan output dari kegiatan yang berada dibawahnya, sehingga baru dapat dikatakan bahwa penyusunan kegiatan-kegiatan dalam dokumen RKA-K/L Batan tahun 2008 telah menyertakan output kegiatan dan sasaan program secara jelas.

#### 4.4. Analisis Jenis Belanja

Jenis Belanja Batan tahun 2008 sebagaimana terangkum dalam dokumen RKA-K/L Batan tahu 2008, dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu: Belanja Pegawai, Belanja barang, dan Belanja Modal. Komposisi jenis belanja pada kategori kegiatan Batan, diperlihatkan dalam gambar 4.4.

Dari gambar 4.4 terlihat bahwa pada kegiatan dasar, jenis belanja pegawai mendominasi pengeluaran, sementara belanja modal nihil. Hal tersebut berkebalikan dengan kegiatan penunjang dan prioritas, dimana pada kedua kegiatan tersebut belanja modal mendominasi, sedangkan belanja pegawai relatif

sangat kecil. Sementara belanja barang memiliki komposisi yang relatif sama pada ketiga kegiatan. Data ini menunjukkan bahwa pada kegiatan dasar tidak ada proses pembentukan modal (pembangunan), sementara pada kegiatan penunjang dan prioritas, kental dengan proses pembentukan modal. Hasil ini kembali menguatkan hasil sebelumnya bahwa RKA-K/L Batan tahun 2008 telah menerapkan keterpaduan pengelolaan kegiatan.



Gambar 4.2 Komposisi jenis belanja per jenis kegiatan Batan

sumber: RKA-K/L Batan tahun 2008; telah diolah kembali

Hasil di atas juga menunjukkan bahwa keterpaduan jenis belanja diterapkan dalam penyusunan RKA-K/L Batan tahun 2008. Hal ini terlihat dalam penerapan belanja modal hanya pada kegiatan penunjang dan prioritas, dan penerapan belanja pegawai yang dominan pada kegiatan dasar. Adapun keberadaan belanja pegawai pada kegiatan penunjang, karena terdapatnya kegiatan *Administrasi Kegiatan* yang mana merupakan rumah bagi panitia penanggungjawab dan pengelola anggaran (tim KPA), artinya: belanja pegawai yang muncul pada kegiatan penunjang adalah belanja honor tidak tetap tim KPA.

Jenis belanja barang terdapat pada ketiga kategori kegiatan. Untuk dapat melihat apakah terjadi duplikasi belanja barang antar kegiatan, maka harus dianalisis melalui Bagan Akun Standar.

Tiap jenis belanja diklasifikasikan menjadi lebih rinci dan fokus ke dalam Bagan Akun Standar (BAS). Data dokumen RKA-K/L Batan tahun 2008 merinci Belanja pegawai Batan menjadi 13 BAS, belanja barang menjadi 20 BAS, dan belanja modal menjadi 7 BAS. Masing-masing BAS terdistribusi ke dalam kegiatan dasar, kegiatan penunjang dan kegiatan prioritas. Nama BAS dan penempatannya pada jenis kegiatan, diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9. Bagan Akun Standar pada kegiatan Batan

No	Kode	Nama Bagan Akun Standar
<i><u>BAS pada Kegiatan Dasar</u></i>		
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS
9	511129	Belanja Uang Makan PNS
10	511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS
11	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS
12	512211	Belanja uang lembur
13	521111	Belanja Keperluan Perkantoran
14	521113	Belanja untuk menambah daya tahan tubuh
15	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
16	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya
17	522111	Belanja Langganan daya dan jasa
18	522112	Belanja Jasa pos dan giro
19	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
20	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
21	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
22	523129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23	523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
24	524111	Belanja perjalanan biasa (DN)
25	524112	Belanja perjalanan tetap (DN)
26	524211	Belanja perjalanan biasa (LN)
<i><u>Bas Pada Kegiatan Penunjang dan Prioritas</u></i>		
27	512112	Belanja Uang Honor Tidak Tetap
28	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya
29	522114	Belanja Sewa
30	522115	Belanja Jasa Profesi
31	522119	Belanja Jasa Lainnya

No	Kode	Nama Bagan Akun Standar
32	524119	Belanja perjalanan lainnya (DN)
33	521211	Belanja Bahan
34	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
35	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
36	534131	Belanja Modal Jaringan
37	535111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Yang Dikapitalisasi
38	535121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Dikapitalisasi
39	535131	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Yang Dikapitalisasi
40	536111	Belanja Modal Fisik Lainnya

sumber: RKA-K/L Batan tahun 2008; telah diolah kembali

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa terjadi deferensiasi yang sangat jelas antara BAS kegiatan dasar dengan BAS kegiatan penunjang dan prioritas. Bila pada level jenis belanja, terdapat belanja barang di setiap kategori kegiatan, maka dengan data BAS ini, terlihat bahwa jenis belanja barang yang terdapat pada kegiatan dasar sepenuhnya berbeda dengan jenis belanja barang yang terdapat pada kegiatan penunjang dan prioritas.

Hasil ini kembali menguatkan hasil sebelumnya bahwa perpaduan jenis belanja telah diterapkan dalam penyusunan RKA-K/L Batan tahun 2008 sehingga tidak terjadi duplikasi antara BAS pada kegiatan dasar dengan BAS pada kegiatan penunjang dan prioritas.

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Tiga tujuan penerapan komponen penganggaran terpadu dalam penyusunan RKA-K/L Batan tahun 2008 telah tercapai. Tujuan pertama, Satuan Kerja menjadi entitas akuntansi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan dan kekayaan dalam Satuan Kerja masing-masing. Hal ini ditandai dengan keberadaan KPA yang memiliki otoritas penuh terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan di Satuan Kerjanya. Tujuan ke-dua, kegiatan dasar diadakan untuk menjadi pendukung pencapaian keluaran kegiatan penunjang dan prioritas, dibuktikan dengan kegiatan dasar yang didominasi oleh belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran, sedangkan kegiatan penunjang dan prioritas diisi oleh belanja investasi. Tujuan ke-tiga, hilangnya tumpang tindih antara satu jenis belanja diterapkan melalui penggunaan Bagan Akun Standar yang mencegah terjadinya duplikasi pemakaian AKUN.
2. Penerapan komponen KPJM pada penyusunan dokumen RKA-K/L terkendala pada data perubahan volume keluaran dan perkiraan maju. Belum adanya metodologi untuk memberikan justifikasi bahwa perkiraan maju yang dicantumkan tersebut merupakan indikasi pendanaan tahun berikutnya, menjadi sebab tidak tertibnya pengisian/input data perkiraan maju.
3. Penerapan komponen penganggaran berbasis kinerja berada pada level kejelasan *output* dari kegiatan dan keterkaitannya dengan sasaran program, dimana *Output* dari kegiatan-kegiatan Batan memiliki kesinambungan dalam hal mewujudkan pencapaian sasaran program terkait, sedangkan sasaran program dalam RKA-K/L memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian misi Batan yang dijabarkan dalam Renstra Batan 2004 – 2009.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan banyaknya data perkiraan maju yang tidak sesuai dengan KPJM, maka disarankan kepada perencana dan penyusun dokumen RKA-K/L untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal perencanaan dan manajemen kegiatan, serta seluk beluk penyusunan RKA-K/L, sehingga data yang direkam merupakan buah dari sebuah pemikiran yang terintegrasi antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Penelitian ini belum menghitung biaya per unit kegiatan, efisiensi kegiatan, kualitas suatu output dan lainnya, karena itu disarankan untuk meneliti subyek-subyek yang terkait dengan hal tersebut guna dapat mengukur kinerja kegiatan secara tepat.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdulkarim, Aim. *Kewarganegaraan*, 1<sup>st</sup> edition, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2006.
- Abimanyu, Anggito. *Format Anggaran Terpadu, Menghilangkan Tumpang Tindih*, <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0405/13/ekonomi/1022296.htm>, Kompas, 15 Oktober 2005.
- Agere, Sam. *Promoting Good Governance-Principles, Practices and Perspectives*, Commonwealth Secretariat, London, 2000.
- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan, *Management Control System*, 8<sup>th</sup> edition, Mc Graw Hill Companies, New York, 2000.
- Arifin, Imamul dan Giana Hadi. *Membuka Cakrawala Ekonomi*, PT Setia Purna, Jakarta, 2009.
- Gray, Cheryl Williamson. *Public expenditure management handbook-World Bank, Poverty Reduction and Economic Management Network*, Washington D.C.1998.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat*, Jakarta, 2002.
- Hansen, Don R dan Maryanne M. Mowen. *Cost Management: Accounting and Control*, 2<sup>nd</sup> edition, South-Western College Publishing, Ohio, 1997.
- Hasyim, Hadi Muttaqin. *Landasan Teori Anggaran Belanja Rutin*, <http://muttaqinhasyim.wordpress.com/2009/06/01/landasan-teoritis-anggaran-belanja-rutin>, 2009.
- Jones, rowan dan Maurice Pendelebury. *Public Sector Accounting*, 4th edition, Pittman Publish, London, 1996.
- Lal, B.B. *Profit Planning and Control in Public Enterprise in India*, Atlantic Publisher and Distributor, New Delhi, 2000.
- Lester, James P dan Joseph Stewart Jr. *Public Policy: An Evolutionary Approach*, Wadsworth, Belmont, 2000.
- Medina, *Penerapan Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah* [http://medinamultimitra.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=10&Itemid=27](http://medinamultimitra.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=27), 2009
- Meyers, Roy T. *Strerategic Budgeting*, the University of Michigan Press, 1996.
- Nugroho, Riant D. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta 2004.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta, 2005.
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). *Reallocation – the role of budget institutions*, OECD Publishing, Paris, 2005.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.2/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang *Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2007*

- Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.05/2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2008
- Rencana Strategik Badan Tenaga Nuklir Nasional 2004 – 2009, Revisi I
- Rudy, Syakran. Anggaran: suatu kesepakatan legislatif-eksekutif, <http://syakran.wordpress.com/2009/10/20/sanggupkah-aku-menjawabnya>, 2009.
- Sancoko, Bambang dkk. Kajian Terhadap Penerapan PBK di Indonesia, BPPK-Depkeu, Jakarta, 2008.
- Schick, Allen dan Felix LoStracco. *The federal budget, politics, policy, process*, edis 3, Brooking Institution Press, Washington D.C., 2007.
- Solikin, Akhmad. Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan, *Jurnal Akuntansi pemerintah* Vol. 2 No. 2, 2006
- Suminto. *Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara, Bahan Penyusunan Budget in Brief 2004*, Depkeu.
- Suprasto, Bambang H. Peluang dan Tantangan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 11 No. 3 , 2006.
- Syahrudin, H. Reformasi Penganggaran Negara: Sebuah Paradigma Baru, Makalah Sidang Pleno ISEI, Balikpapan, 19-20 Juli 2007.
- Taliercio, Rob. *Budget Formulation: Good Practices*, [www1.worldbank.org/publicsector/pe/pfma07/Presentations/Taliercio.ppt](http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/pfma07/Presentations/Taliercio.ppt), 2007
- Treasure guidelines, MTEF Republic of South Africa, [www.treasury.gov.za](http://www.treasury.gov.za), 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia, tentang Ketenaganukliran, nomor 10 tahun 1997.
- Undang-undang Republik Indonesia, tentang Keuangan Negara, nomor 17 tahun 2003.
- Wattimena, Reza A.A. *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Welsch, Glenn A. *Budgeting Profit Planning and Control*, fourth edition, prentice hall of India Private Limited, New Delhi, 1981.
- Wrihatnolo, Randi R dan Riant Nugroho D. *Manajemen Pembangunan Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006.

Lampiran 1.a. Contoh hasil cetak Form 1.1 RKA-K/L Batan tahun 2008

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA TA 2008**  
**RJNCIAN KEGIATAN DAN KELUARAN**

FORMULIR 1.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (060) **BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**  
 UNIT ORGANISASI : (060.01) **BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**  
 SATUAN KERJA : (017.003) **PUSAT TEKNOLOGI NUKLIR BAHAN DAN RADIONOMETRI**  
 LOKASI SATKER : (02.51) **KOTA BANDUNG**  
 SUB FUNGSI : (05.03) **PENANGGULANGAN POLUSI**  
 PROGRAM : (05.03.02) **PROGRAM PENGENDALIAN RENCAMARAN DAN PERUBAHAN LINGKUNGAN HOLOP**  
 HASIL PROGRAM : **Terpaparnya masyarakat lingkungan dan distributnya data rona lingkungan**

KODE	KEGIATAN DAN KELUARAN	SATUAN KELUARAN	SABARAN KELUARAN				LOKASI KEGIATAN *) TAHUN 2008	PELAKSANA KEGIATAN *) TAHUN 2008
			2005	2007	2008	2009		
111			15	05	03	01	01	011
3028	Pembinaan dan evaluasi Rencanalisasi Lingkungan Tingkat Isp : DATA RONA RADIKAL IDENTAS LINGKUNGAN KESEKELILINGAN LINGKUNGAN SETA JADWAL KESEKELILINGAN	PAKET	1	1	1	1	1	02
3030	EVALUASI DAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN GAMBAR 1 1. PENCANTUMAN LOKASI DAN WILAYAH 2. PENCANTUMAN LOKASI DAN WILAYAH 3. PENCANTUMAN LOKASI DAN WILAYAH 4. PENCANTUMAN LOKASI DAN WILAYAH	LAP	3	1	2	2	2	

\*) Untuk Dokumen RKA-K/L yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pelaksana  
 Bandung, 1 Oktober 2007  
 Kepala Pusat Teknologi Nuklir  
 Bahan dan Radionometri  
 Drs. Diahmawati, N.Sc.  
 NIP. 330002309

Lampiran 1.b. Contoh hasil cetak Form 1.2 RKA-K/L Batan tahun 2008

FORMULIR 1.2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA TA 2008  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN

SATUAN KERJA : (01.7263)  
LOKASI SATKER : (02.51)  
PROGRAM : (03.03.02)

REVISI TERNOLOS HUKUR BAHAN DAN RADIONOMETRI  
KOTABANDUNG  
PROGRAM PENYEDULAN PENCERAIAN DAN PERUSAHAAN LINGKUNGAN HIDUP

Halaman : 1

KODE	KEGIATAN/LOKASI KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (dalam ribuan/USD)					Sumber Dana TA 2008	Praktoran Maju TA 2009	Praktoran Maju TA 2008	Sumber Dana TA 2008-2010
		Revisi TA 2008	Anggaran TA 2007	Perkiraan Maju TA 2007	Perubahan	Udian				
01		0	0	0	0	0	0	0	0	
0126	Pembangunan Fasilitas Radiasi dan Lingkungan Lokasi : (02) - JAWA BARAT	0	337.380	0	337.380	337.380.000	337.380	337.380	RM	
	RUPAH MELINE	0	337.380	0	337.380	337.380	337.380	337.380		
	PENDAPATAN LAIN LAIN NEGARA	0	0	0	0	0	0	0		
	PENDAPATAN LAIN LAIN NEGARA	0	0	0	0	0	0	0		
	RUPAH MELINE PENDAPAT PUNGUT	0	0	0	0	0	0	0		
	SYERONG	0	0	0	0	0	0	0		
	JUMLAH TOTAL	0	337.380	0	337.380	337.380	337.380	337.380		

Bandung, 1 Oktober 2007  
Kepala Pusat Teknologi Nuklir  
Bahan dan Radiasi:

Drs. Djamil MSc.  
NIP. 3001002009

Lampiran 1.c. Contoh hasil cetak Form 1.3 RKA-K/L Batan tahun 2008

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA TA 2008**  
**RINDI ANV ANDARAN BELANJA PER JENIS BELANJA**

FORMULIR 1.3

Informasi 1

SATUAN KERJA 1 (010.01.017202) PUSAT TEKNOLOGI NUKLEER BAHAN DAN RADIONUKLEOMETRI  
 LOKASI SATKER 1 (012.01) KOTA BANDUNG  
 PROGRAM 1 (015.03.02) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAHAAN LINGKUNG ANHIDROP

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA 2008 (dalam ribuan rupiah)**

KODE	KEGIATAN	PEGAWAY	BARANG	MODAL	BAHTUAN SOSIAL	JUMLAH	Informasi 1		
							JH	DPKOK	DAWA TF
							B	R	KD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6928	PEMANTAUAN DAN EVALUASI RADIONUKLID LINGKUNGAN LOKASI 1 (012) - JAWA BARAT	0	114.500	220.850	0	305380	0	0	0
	Jumlah	0	114.500	220.850	0	305380	0	0	0
	Jumlah RUPIAH HURNI	0	114.500	220.850	0	305380	0	0	0
	Jumlah POKOKAN LUAR NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah RUPIAH HURNI PERDAMPONG	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah PHSE	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah BROMO LAYANAN URUM	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	114.500	220.850	0	305380	0	0	0

Bandung, 7 Oktober 2007  
 Kepala Pusat Teknologi Nuklir  
 Batan Bandung 071

Drs. Dikdikulita, MSk  
 NIP. 501002209

berikladdfkkk asdf

Lampiran 1.d. Contoh hasil cetak Form 1.4 RKA-K/L Batan tahun 2008

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA TA 2008**  
**RIN OI NY ANUGARAN PENDAPATAN PER MAP**  
(dalam ribuan Rupiah)

SATUAN KERJA : (000.01.017160) PUSAT TEKNOLOGI NUKLIR BAHAN DAN RADIONUKLEIDI  
LOKASI SENTER : (02281) KOTA BONDOLUNG  
PROGRAM : (01.04.02) PROGRAM DUKUN DAN PEMANFAATAN IPIEK

FORMULIR 1.4  
Halaman: 1

KODE	KETERANGAN, KELompok PENDAPATAN, Jenis PENDAPATAN DAN MIP	KERLEKSI PENDAPATAN TA 2008	SARANAN PENDAPATAN TA 2007	LEBIH PENDAPATAN TA 2008	PERANAN PENDAPATAN TA 2007	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
6916	LAYANAN PEMANFAATAN IPIEK NUKLIR BAGI MASYARAKAT	0	32.240	66.040	69.220	
6916	LAYANAN PEMANFAATAN IPIEK BAGI MASYARAKAT	0	32.240	66.040	69.220	
6916.42	PENYERVISAN NEGARA BUCAN PADUK	0	32.240	66.040	69.220	
6916.42.4221	Fasilitas Pelayanan dan Sova	0	6.000	17.240	49.620	
423135	Pendidikan Perbaikan Obat-obatan dan Hasil Tersebut Lainnya	0	6.000	16.000	15.000	
423139	Pendidikan Perbaikan Lainnya	0	0	0	0	
423140	Pendidikan Perbaikan Lainnya Kode tidak ada dalam tabel	0	0	6.000	6.000	
6916.42.4222	Pendidikan Jasa Pendidikan Jasa Tenaga, Pelaksana, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendidikan BPA, P	0	26.240	39.600	39.600	
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>26.240</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	

Bandung, 1 Oktober 2007  
Kendia Rusak Teleskop Nuklir  
Bahayadan Radismetri  
Drs. Djasmala, MSc.  
NIP. 3001002319



## Lampiran 2. Jenis Belanja Per Kegiatan Batan Tahun 2008

Nama Kegiatan		B Pegawai	B Barang	B Modal
<i>Kegiatan Dasar</i>				
1	Pengelolaan Gaji, Honorarium Dan Tunjangan	175.303.506	-	-
2	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	-	83.462.669	-
<i>Kegiatan Penunjang</i>				
3	Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	-	211.900	77.500
4	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Dan Prasarana	-	-	3.775.000
5	Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja Dan Anggaran	368.050	790.739	192.500
6	Pengelolaan Dan Pengendalian Anggaran	2.361.130	30.700	1.031.530
7	Pengembangan SDM Dan Administrasi Kepegawaian	227.050	466.482	318.000
8	Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Negara	290.073	543.736	666.833
9	Penyelenggaraan Pengawasan Dan Pemeriksaan Aparatur Negara (Internal)	-	115.000	205.000
10	Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/Perpustakaan	-	-	5.330.350
11	Perawatan Prasarana Dan Jaringan	-	-	4.044.650
12	Layanan Pemanfaatan Iptek Bagi Masyarakat	3.317.692	4.139.707	827.501
13	Peningkatan Jaringan Kelembagaan Iptek	34.600	546.618	276.300
14	Revitalisasi Dan Pendayagunaan Reaktor, Instalasi Dan Fasilitas Nuklir	289.704	3.590.455	16.041.852
15	Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir	119.042	243.100	237.858
16	Pelaksanaan Standardisasi Iptek Nuklir	204.800	191.900	53.300
17	Pembinaan Dan Pengelolaan Keuangan, Sarana Dan Prasarana	109.400	724.395	715.500
18	Pengembangan Sistem Informasi Ketenaganukliran	75.600	260.302	836.830
<i>Kegiatan Prioritas</i>				
19	Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir	-	626.930	1.194.250
20	Pengembangan Teknologi Perekayasaan Perangkat Nuklir	9.000	754.921	1.065.580
21	Pengembangan Teknologi Proses Radioisotop Dan Radiofarmaka	-	461.597	2.062.832
22	Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop Dan Radiasi	21.600	2.153.097	2.875.000

(lanjutan)

	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>B Pegawai</b>	<b>B Barang</b>	<b>B Modal</b>
23	Pengembangan Teknologi Reaktor Dan Energi Nuklir	57.930	654.914	1.815.988
24	Pengembangan Teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif	30.450	606.655	1.198.743
25	Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir	16.500	3.813.395	3.005.060
26	Pendayagunaan Hasil Litbang Iptek Nuklir	-	804.734	726.517
27	Pemantauan Dan Evaluasi Radioaktivitas Lingkungan	-	830.677	2.321.392
28	Pengembangan Teknologi Akselerator Dan Proses Bahan	-	1.002.335	1.499.023
29	Pengembangan Teknologi Bahan Galian Nuklir	291.500	1.275.401	2.072.236
30	Pengembangan Teknologi Bahan Industri Nuklir	-	445.515	245.000
31	Pengembangan Teknologi Keselamatan, Metrologi Radiasi Dan Biomedika Nuklir	-	1.080.122	1.842.550
32	Pengembangan Teknologi Nuklir Bahan Dan Radiometri	-	500.940	943.000
33	Penyiapan Infrastruktur Dasar Pendukung Pembangunan PLTN	-	2.884.770	9.413.327
	<b>Jumlah</b>	<b>183.127.627</b>	<b>13.213.706</b>	<b>66.911.002</b>

**Lampiran 3. Kegiatan Batan dan keluarannya dalam Sasaran Program  
Batan tahun 2008**

Program	Sasaran	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	Terselenggaranya tugas pokok dan fungsi kelembagaan iptek nuklir.	1. Pengelolaan Gaji, Honorarium & Tunjangan	Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji, Honorarium Dan Tunjangan Dalam Setahun
		2. Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran	Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
		3. Pengelolaan & Pengendalian Anggaran	Terlaksananya 1 Paket Kegiatan Pengelolaan Dan Pengendalian Anggaran
Program Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Negara	Meningkatnya fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja litbangyasa iptek nuklir.	4. Pembinaan/Koordinasi/ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	Paket Laporan Monitoring Dan Evaluasi Dan Pelaporan Hasil Program Litbangyasa, Diseminasi, Dan Manajemen Kelembagaan
		5. Penyelenggaraan Pengawasan & Pemeriksaan Aparatur Negara (Internal)	Jumlah Paket Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan
Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Meningkatnya kualitas & profesionalisme sumber daya manusia untuk melaksanakan litbangyasa iptek nuklir.	6. Pengembangan SDM & Administrasi Kepegawaian	Terwujudnya Pembinaan SDM Yang Profesional Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Yang Baik
		7. Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Aparatur Negara	Jumlah Penyelenggaraan Diklat Teknis Di Bidang Ketenaganukliran
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Negara	Bertambahnya fungsi sarana dan prasarana pendukung litbangyasa iptek nuklir.	8. Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana & Prasarana	Terselenggaranya Pembangunan/Peningkatan Sarana Dan Prasarana
		9. Rehabilitasi/Peningkatan/ Renovasi Gedung/ Lab/ Perpustakaan	Paket Gedung/Laboratorium/ Perpustakaan Yang Direhabilitasi Dan Direnovasi
		10 Perawatan Prasarana & Jaringan	Jumlah Paket Prasarana Dan Jaringan Yang Terawat
Program Penelitian & Pengembangan Iptek	Terselenggaranya litbangyasa iptek nuklir untuk peningkatan kompetensi bidang energi dan non energi,	11 Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir	Teknologi Pengujian Elemen Bakar Nuklir Dan Daur Ulang, Proses Dan Modeling Elemen Bakar Nuklir
		12 Pengembangan Teknologi Perekayasa Perangkat Nuklir	2 Sub Kegiatan Teknologi Perekayasa Perangkat Nuklir Untuk Keselamatan Nuklir Dan Kesehatan Dan Industri
		13 Pengembangan Teknologi Proses Radioisotop & Radiofarmaka	Teknologi Proses Produksi Radioisotop Dan Radiofarmaka

(lanjutan)

Program	Sasaran	Kegiatan	Indikator Kegiatan
	pengelolaan limbah radioaktif serta keselamatan nuklir dan radiasi.	14 Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop & Radiasi	Aplikasi Teknologi Isotop Dan Radiasi Di Bidang Pertanian, Peternakan, Kesehatan, Industri Dan Sda
		15 Pengembangan Teknologi Reaktor & Energi Nuklir	Teknologi Reaktor Riset Dan Daya Serta Keselamatan Nuklir
		16 Pengembangan Teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif	2 Paket Teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif Pltn Dan Non Pltn
		17 Pengembangan Teknologi Akselerator & Proses Bahan	Teknologi Akselerator Dan Rekayasa Basic Design Package Mbe
		18 Pengembangan Teknologi Bahan Galian Nuklir	Tersedianya Akses Dan Lahan Platform 0,5 Km2 Di Remaja, Pemboran Inti Total Kedalaman 450 M Di Sibolga, Sum-Ut, Pemboran Air 125 M Di Cipanas, Terujinya 1 Unit Alat Pengolahan Uranium Dan Terpantaunya Lingkungan Kawasan Kalam 20 Km2
		19 Pengembangan Teknologi Bahan Industri Nuklir	Teknologi Bahan Industri Nuklir, Karakterisasi Dan Analisis Aktivasi Neutron (Aan)
		20 Pengembangan Teknologi Keselamatan, Metrologi Radiasi & Biomedika Nuklir	Jumlah Laporan Dari Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dalam Bidang Keselamatan, Metrologi Radiasi Dan Biomedika Nuklir
Program Difusi & Pemanfaatan Iptek	Diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir melalui publikasi dan promosi serta pemanfaatannya oleh masyarakat.	22 Layanan Pemanfaatan Iptek Bagi Masyarakat	Terlaksananya Layanan Pemanfaatan Iptek Bagi Masyarakat
		23 Diseminasi Hasil litbang Iptek Nuklir	Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi Dan Promosi Hasil Litbang Iptek Nuklir
Program Penguatan Kelembagaan Iptek	Meningkatnya Kinerja Manajemen Kelembagaan Iptek Nuklir, Standarisasi, Akreditasi dan Optimalisasi	24 Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja & Anggaran	Dokumen Perencanaan Program Dan Anggaran Serta Pelakasnaan Program Dan Kegiatan Iptek Nuklir
		25 Peningkatan Jaringan Kelembagaan Iptek	Jumlah Dokumen (Naskah) Perjanjian Kerja Sama Yang Ditandatangani
		26 Revitalisasi & Pendayagunaan Reaktor, Instalasi & Fasilitas Nuklir	Jumlah Kegiatan Revitalisasi Dan Pendayagunaan Reaktor, Instalasi Dan Fasilitas Nuklir

(lanjutan)

Program	Sasaran	Kegiatan	Indikator Kegiatan
	Reaktor, Instalasi dan Fasilitas Nuklir.	27 Pelaksanaan Standardisasi Iptek Nuklir	3 Paket Dokumen (Standardisasi Iptek Nuklir, Akreditasi Dan Sertifikasi Iptek Nuklir, Dan Jaminan Mutu Nuklir)
		28 Pembinaan & Pengelolaan Keuangan, Sarana & Prasarana	Terbinanya Dan Terkelolanya Keuangan, Sarana Dan Prasarana
		29 Pengembangan Sistem Informasi Ketenaganukliran	Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Ketenaganukliran
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Meningkatnya kapasitas hasil litbangnya iptek nuklir dan partisipasi industri nasional dalam mendukung pembangunan PLTN.	30 Pendayagunaan Hasil Litbang Iptek Nuklir	Jumlah Kegiatan Pendayagunaan Hasil Litbang Iptek Nuklir
		31 Penyiapan Infrastruktur Dasar Pendukung Pembangunan PLTN	Jumlah Dokumen Infrastruktur Dasar Pendukung Pembangunan Pltn
Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup	Terpantau-nya radioaktivitas lingkungan dan diperolehnya data rona lingkungan.	32 Pemantauan & Evaluasi Radioaktivitas Lingkungan	2 Paket Data Rona Radioaktivitas Lingkungan, Keselamatan Lingkungan Serta Inspeksi Keselamatan
Program Pendidikan Kedinasan	Terselenggaranya pendidikan tinggi teknologi nuklir	33 Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir	1 Paket Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir

Lampiran 4. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Batan per Kegiatan

KEGIATAN	SATKER	SATUAN KELUARAN	VOLUME SATUAN		ANGGARAN & PERKIRAAN MAJU			
			2008	2009	2010	2008	2009	2010
0001 Pengelolaan Gaji, Honorarium Dan Tunjangan	PATIR	ORANG	378	380	380	18.817.243	18.916.805	18.916.805
	PPGN	ORANG	237	230	220	11.577.526	11.235.573	10.747.070
	K. PUSAT	ORANG	416	420	450	16.571.295	16.571.295	17.754.958
	PTNBR	ORANG	232	238	238	11.808.285	12.113.671	12.113.671
	PTAPB	ORANG	441	441	441	23.839.339	23.839.339	23.839.339
	PTKMR	ORANG	165	166	167	8.532.726	8.584.439	8.636.152
	PKTN	ORANG	236	242	242	10.641.264	10.911.804	10.911.804
	PDL	ORANG	85	87	87	3.918.007	4.010.195	4.010.195
	PRSG	ORANG	179	179	179	8.736.563	8.736.563	8.736.563
	PTBN	ORANG	218	226	226	10.760.154	11.155.022	11.155.022
	PTBIN	ORANG	139	139	139	7.232.370	7.232.370	7.232.370
	PRPN	ORANG	126	126	126	5.836.869	5.836.869	5.836.869
	PRR	ORANG	131	134	134	6.302.893	6.447.234	6.447.234
	PTLR	ORANG	161	161	161	7.799.391	7.799.391	7.799.391
	PPIN	ORANG	66	73	73	3.193.205	3.531.878	3.531.878
	PTRKN	ORANG	138	141	150	7.268.386	7.426.394	7.900.419
	STIN	ORANG	60	70	80	3.095.582	3.611.512	4.127.442
	PPEN	ORANG	87	92	92	4.210.861	4.452.864	4.452.864
	INSP	ORANG	25	26	26	1.284.286	1.335.657	1.335.657
PDIN	ORANG	40	45	45	1.950.346	2.194.139	2.194.139	
PSJMN	ORANG	38	38	38	1.926.915	1.926.915	1.926.915	
0002 Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	PATIR	KEG	30	30	30	4.667.991	4.667.991	4.667.991
	PPGN	KEG	26	26	26	2.548.737	2.548.737	2.548.737
	K. PUSAT	PAKET	1	1	1	13.341.728	13.341.728	13.341.728
	PTNBR	KEG	29	29	29	3.382.896	3.382.896	3.382.896

(lanjutan)

KEGIATAN	SATKER	SATUAN KELUARAN		VOLUME SATUAN		ANGGARAN & PERKIRAAN MAJU		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	
	PTAPB	KEG	30	30	30	2.934.307	2.934.307	2.934.307
	PWLN	PKT	1	1	1	725.000	725.000	725.000
	PTKMR	KEG	1	1	1	2.930.213	293.213	2.930.213
	PKTN	KEG	29	29	29	22.755.075	22.755.075	22.755.075
	PDL	KEG	23	23	23	2.218.007	2.218.007	2.218.007
	PRSG	KEG	23	23	23	12.970.648	12.970.648	12.970.648
	PTBN	KEG	28	28	28	1.609.662	1.609.662	1.609.662
	PTBIN	KEG	32	1	1	1.432.512	44.766	44.766
	PRPN	KEG	27	27	27	1.707.677	1.707.677	1.707.677
	PRR	KEG	25	27	27	870.693	940.348	940.348
	PTLR	KEG	25	25	25	1.481.175	1.481.175	1.481.175
	PPIN	KEG	22	23	23	1.863.910	1.948.633	1.948.633
	PTRKN	KEG	29	29	29	1.668.360	1.668.360	1.668.360
	STTN	KEG	25	25	25	1.054.230	1.054.230	1.054.230
	PPEN	KEG	23	23	23	1.092.071	1.092.071	1.092.071
	INSP	KEG	17	17	17	562.665	562.665	562.665
	PDIN	KEG	20	20	20	1.413.477	1.413.477	1.413.477
	PSJMN	KEG	15	15	15	231.635	231.635	231.635
	K. PUSAT	PAKET	1	1	1	289.400	289.400	289.400
0021 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan								
0024 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Dan Prasarana	K. PUSAT	PKT	5	7	10	3.775.000	5.285.000	7.550.000
0035 Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja Dan Anggaran	K. PUSAT	PAKET	13	13	13	1.351.289	1.351.289	1.351.289
0043 Pengelolaan Dan Pengendalian Anggaran	PATR	BLN	12	12	12	131.280	131.280	131.280
	PPGN	PKT	1	1	1	212.160	212.160	212.160
	K. PUSAT	PKT	1	1	1	407.195	407.195	407.195

(lanjutan)

KEGIATAN	SATKER	SATUAN KELUARAN		VOLUME SATUAN		ANGGARAN & PERKIRAAN MAJU		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	
	PTNBR	BULAN	12	12	12	141.035	141.035	141.035
	PTAPB	BULAN	12	12	12	201.065	201.065	201.065
	PTKMR	ORANG	1	1	1	159.500	159.500	159.500
	PKTN	BULAN	1	1	1	288.260	288.260	288.260
	PDL	ORANG	48	50	50	75.415	78.557	78.557
	PRSG	BLN	12	12	12	281.860	281.860	281.860
	PTBN	PAKET	2	2	2	151.510	151.510	151.510
	PTBIN	BULAN	12	12	12	175.180	175.180	175.180
	PRPN	PAKET	1	1	1	147.220	147.220	147.220
	PRR	BULAN	1	1	1	124.310	124.310	124.310
	PTLR	BLN	12	12	12	126.080	126.080	126.080
	PPIN	BULAN	12	12	12	156.595	156.595	156.595
	PTRKN	BULAN	12	12	12	218.650	218.650	218.650
	STTN	ORANG	48	48	48	67.710	67.710	67.710
	PPEN	ORANG	9	10	10	115.575	128.416	128.416
	INSP	ORANG	30	30	30	46.740	46.740	46.740
	PDJN	BULAN	12	12	12	138.890	138.890	138.890
	PSJMN	BULAN	1	1	1	57.130	57.130	57.130
0051 Pengembangan Sdm Dan Administrasi Kepegawaian	K. PUSAT	PKT	1	1	1	1.011.532	1.011.532	1.011.532
0067 Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Negara	PDL	PAKET	4	6	6	1.500.642	2.250.963	2.250.963
0084 Penyelenggaraan Pengawasan Dan Pemeriksaan Aparatur Negara (Internal)	INSP	PAKET	2	2	2	320.000	320.000	320.000
0100 Rehabilitasi/ Peningkatan/ Renovasi Gedung/ Laboratorium/ Perpustakaan	PTNBR	PAKET	1	0	0	3.500.000	0	0
	PKTN	PAKET	1	1	1	1.830.350	1.830.350	1.830.350

(lanjutan)

KEGIATAN	SATKER	SATUAN KELUARAN	VOLUME SATUAN			ANGGARAN & PERKIRAAN MAJU		
			2008	2009	2010	2008	2009	2010
6905 Perawatan Prasarana Dan Jaringan	PKTN	PAKET	5	4	4	4.044.650	3.235.720	3.235.720
6909 Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir	PTBN	PAKET	3	1	1	1.821.180	607.060	607.060
6910 Pengembangan Teknologi Perekayaan Perangkat Nuklir	PRPN	PAKET	2	2	2	1.829.501	3.979.501	4.304.501
6911 Pengembangan Teknologi Proses Radioisotop Dan Radiofarmaka	PRR	PAKET	2	2	2	2.524.429	3.358.179	3.474.429
6912 Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop Dan Radiasi	PATR	PKT	1	1	1	5.049.697	11.049.697	12.049.697
6913 Pengembangan Teknologi Reaktor Dan Energi Nuklir	PTRKN	PAKET	2	2	2	2.528.832	4.348.832	4.894.832
6914 Pengembangan Teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif	PTLR	PAKET	2	0	0	1.835.848	988.000	1.085.000
6916 Layanan Pemanfaatan Iptek Bagi Masyarakat	PATR	SGIAT	2	2	2	767.460	1.294.170	1.398.745
	PPGN	PKT	1	1	1	764.331	1.482.230	1.697.599
	PTNBR	PAKET	1	1	1	52.962	86.543	86.543
	PTAPB	KEG	1	1	1	104.045	104.045	104.045
	PTKMR	PKT	1	1	1	1.067.175	2.185.175	2.297.175
	PDL	PAKET	1	1	1	950.280	950.280	950.280
	PRSG	PKT	4	4	4	733.340	733.340	733.340
	PTBN	PAKET	1	1	1	950.000	950.000	950.000
	PTBIN	PAKET	1	1	1	85.574	154.574	168.574
	PRR	PAKET	1	1	1	33.950	33.950	33.950
	PTLR	KEG	2	2	2	844.350	1.556.850	1.604.350
	PPIN	LAP	1	1	1	79.800	157.800	164.800
	PTRKN	PAKET	1	1	1	93.000	93.000	93.000

(lanjutan)

KEGIATAN	SATKER	SATUAN KELUARAN	VOLUME SATUAN			ANGGARAN & PERKIRAAN MAJU		
			2008	2009	2010	2008	2009	2010
6917 Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir	STTN	PAKET	2	2	2	1.758.633	1.758.633	1.758.633
	PDIN	PAKET	2	2	2	6.834.955	9.585.455	10.272.455
6919 Peningkatan Jaringan Kelembagaan Iptek	K. PUSAT	NSKH	8	0	0	857.518	0	0
6921 Revitalisasi Dan Peningkatan Reaktor, Instalasi Dan Fasilitas Nuklir	PPGN	PKT	1	1	1	773.905	4.712.905	5.893.905
	PTNBR	PAKET	2	2	2	1.950.721	1.950.721	1.950.721
	PTAPB	PAKET	2	2	2	525.971	525.971	525.971
	PKTN	PAKET	1	1	1	2.044.696	7.744.696	8.744.696
	PRSG	PKT	5	5	5	5.213.100	5.213.100	5.213.100
	PTBN	PAKET	1	0	0	1.596.248	0	0
	PTBIN	PAKET	9	10	10	844.154	937.948	937.948
	PRR	PAKET	14	14	14	5.906.185	5.906.185	5.906.185
	PTLR	PAKET	2	0	2	561.278	0	561.278
	PTRKN	PAKET	1	1	1	505.753	505.753	505.753
6924 Peninggunaan Hasil Litbang Iptek Nuklir	PKTN	KEG	2	2	2	1.531.251	3.221.251	3.728.251
6925 Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir	STTN	PAKET	1	1	1	600.000	1.200.000	1.300.000
6927 Pelaksanaan Standardisasi Iptek Nuklir	PSJMN	PAKET DOK	4	4	4	450.000	450.000	450.000
6928 Pemantauan Dan Evaluasi Radioaktivitas Lingkungan	PATIR	PAKET	4	4	4	1.283.842	1.283.842	1.283.842
	PTNBR	PAKET	1	1	1	335.380	335.380	3.353.820
	PTAPB	PKT	5	1	1	501.360	100.272	100.272
	PTLR	PAKET	2	0	0	1.031.487	0	0
6929 Pembinaan Dan Pengelolaan Keuangan, Sarana Dan Prasarana	K. PUSAT	PKT	2	2	2	1.549.295	1.549.295	1.549.295

(lanjutan)

KEGIATAN	SATKER	SATUAN KELUARAN	VOLUME SATUAN		ANGGARAN & PERKIRAAN MAJU		
			2008	2009	2008	2009	2010
6930 Pengembangan Sistem Informasi Ketenaganukliran	PPIN	PAKET	2	2	1.172.732	1.172.732	1.172.732
6931 Pengembangan Teknologi Akselerator Dan Proses Bahan	PTAPB	PAKET	4	4	2.501.358	2.501.358	2.501.358
6932 Pengembangan Teknologi Bahan Galian Nuklir	PPGN	PKT	1	1	3.639.137	3.639.137	3.639.137
6933 Pengembangan Teknologi Bahan Industri Nuklir	PTBIN.	PAKET	2	2	690.515	690.515	690.515
6934 Pengembangan Teknologi Keselamatan, Metrologi Radiasi Dan Biomedika Nuklir	PTKMR	LAP	22	21	2.922.672	2.789.823	2.789.823
6935 Pengembangan Teknologi Nuklir Bahan Dan Radiometri	PTNBR	PAKET	2	2	1.443.940	1.443.940	1.443.940
6936 Penyiapan Infrastruktur Dasar Pendukung Pembangunan PLTN	PPEN	LAP.	16	16	12.298.097	12.298.097	12.298.097
				<b>Jumlah</b>	<b>363.252.335</b>	<b>394.507.062</b>	<b>410.739.402</b>